



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI V DPR RI
DENGAN
MENTERI PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 3
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.20--13.51 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK-V) Gedung Nusantara DPR RI - Jakarta
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA. 2024 sampai bulan Mei 2024,
2. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan
3. Lain-lain.
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI
Hadir : A. Pimpinan
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Ir. Ridwan Bae
3. Roberth Rouw
B. Anggota
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)
4. Mochamad Herviano
5. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
6. Sri Rahayu
7. Harvey B. Malaihollo
8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)
9. Drs. Hamka B Kady, M.S.
10. DR. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si.
11. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

h

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(F-GERINDRA)**

- 12. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
- 13. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
- 14. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-
NASDEM)**

- 15. Drs. H. Tamanuri, M.M.
- 16. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
- 17. Sri Wahyuni

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-
PKB)**

- 18. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
- 19. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
- 20. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
- 21. H. An'im Falachuddin Mahrus
- 22. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
- 23. H. Syafiuddin, S.Sos.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

- 24. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P.
- 25. Willem Wandik
- 26. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-
PKS)**

- 27. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

- 28. H. Boyman Harun, S.H.
- 29. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
- 30. Mesakh Mirin, SKM., M.I.Kom.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)**

- 31. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

- Izin :
- 1. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA. (F-PDI Perjuangan)
 - 2. Cen Sui Lan (F-PG)
 - 3. Ilham Pangestu (F-PG)
 - 4. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. (F-Gerindra)
 - 5. Drs. H. Soehartono, M.Si. (F-Nasdem)
 - 6. Drs. Fadholi, M. Ikom. (F-Nasdem)
 - 7. Lasmi Indaryani, S.E. (F-PD)
 - 8. Ir. H. Sigit Sosiantomo (F-PKS)

- Undangan
1. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi);
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI (Novie Riyanto);
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan RI;
 4. Jajaran Pejabat Kementerian Perhubungan RI.

la

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Pak Menteri,
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Teman-teman Anggota Komisi V mari kita mulai rapat kita pada pagi hari ini. Mohon maaf ini sudah terlambat 25 menit dari jadwal yang kita tentukan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi, selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya, serta
Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat kerja hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari, siang hari ini untuk melaksanakan rapat sesuai dengan sudah kita jadwalkan dalam keadaan sehat dan *wal'afiat*.

Menurut laporan dari Sekretariat yang sudah menandatangani absen sudah 25 orang dari 7 unsur fraksi yang berbeda.

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini sudah bisa kita lanjut, sudah memenuhi kuorum dan izinkan saya membuka Rapat Kerja ini sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Kerja ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI,
Menteri, dan
Hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan jadwal yang sudah Badan Anggaran DPR RI disampaikan juga kepada kami, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2025 dan RKP tahun 2005 bersama dengan kementerian/lembaga, kepala badan atau mitra yang lain di seluruh komisi masing-masing dan kami diberikan batas waktu untuk menyerahkan hasil pembahasan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2024.

Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa dari Kementerian Perhubungan bahwa realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per 31 Mei 2024 adalah sebesar 32,23% atau menyerap 13,73 triliun dari total anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2024. Untuk itu, pada kesempatan Rapat Kerja ini kami perlu mendapatkan penjelasan dari Saudara Menteri Perhubungan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan atau barangkali serapan ini bisa jadi juga sudah melebihi target atau belum mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dalam rencana kerja tahun 2024.

Selanjutnya, Rapat Kerja ini akan membahas rencana kerja pemerintah dan pembicaraan penduluan, pendahuluan RAPBN tahun 2025. Dalam hal ini, pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, pada indikatif..., pagu indikatif Kementerian Perhubungan tahun 2025 sesuai yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan eh Kementerian Keuangan adalah sebesar 24,76 triliun. Pagu indikatif tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 13,83 triliun atau 35% terhadap anggaran tahun lalu, dimana 2024 anggaran Kementerian Perhubungan sebesar 38,6 triliun.

Saya rasa ini persoalan tersendiri, Pak Menteri, dengan rencana kerja Pak Menteri untuk menghadapi kabinet yang akan datang. Ini kabinet yang sekarang ini kan berakhir di APBN tahun 2024, nanti juga perlu disampaikan kepada kami, apakah seluruh Renstra dari Kementerian Perhubungan ini sudah tercapai semua atau belum. Ini juga belum kami dengarkan karena ini rapat terakhir kita, Pak, untuk per anggaran. Selanjutnya nanti kita sudah membahas satuan untuk masing-masing kegiatan di APBN tahun 2025 setelah nanti pemerintah menyampaikan nota keuangan yang akan dibacakan oleh Presiden seperti biasa setiap tanggal 16 Agustus di setiap tahunnya.

Oleh karenanya, mungkin di forum yang terhormat ini ya kesempatan terakhir kita untuk bicara APBN tahun 2024 ini, Pak Menteri bisa menyampaikan kepada kami sejauhmana capaian kinerja terhadap Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2019 sampai dengan 2024.

Bapak-Ibu sekalian,

Penurunan harga, penurunan anggaran di Kementerian Perhubungan sebesar 13,83 triliun atau 35%, ya kalau secara Renstra, Pak Menteri, dari 2019 ke 2024 ya enggak ada *ngaruh sih*, Pak Menteri, tapi kalau Pak Menteri masih ditunjuk nanti jadi Menteri Perhubungan tentu ini persoalan ya, karena terjadi penurunan anggaran begitu besar. Ini sudah kabinet baru nanti melaksanakannya, Pak ya, bulan Oktober tahun depan pasti sudah pelantikan itu, apa tahun ini pasti sudah pelantikan kabinet baru dan masa kabinet lama sudah berakhir.

Jadi, Pak Menteri, dengan turunnya 13,83 triliun ini ya Pak Menteri enggak usah terlalu pusinglah mikirin ini, ya. Ini menjadi PR Menteri Perhubungan berikutnya.

Bapak-Ibu sekalian,

Anggaran pembangunan nasional di bidang transportasi, program dukungan manajemen dan program konektivitas juga akan kita sampaikan masukan dan saran dari kami. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan beberapa isu strategis ya terkait dengan masukan kami yang perlu menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan setelah melihat waktu berjalan sampai dengan hari ini terkait dengan pelaksanaan APBN tahun 2024.

Yang pertama, dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai tema RKP 2025, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar belanja Kementerian tahun 2025, tentu ini sebetulnya dengan menteri nanti harusnya ini kita bahas ya. Saya rasa poin ini tidak perlu saya, saya bahas dulu hari ini, Pak, ini konteksnya 2025 ini, tapi kepada Pak Sekjen dan Dirjen-Dirjen dan seluruh pejabat Eselon I dan Eselon II dari Kementerian Pekerjaan, Kementerian Perhubungan tentu ini juga menjadi penting ya, karena ini masukan ini dan kita harapkan ada korelasi antara tema dengan program yang akan disusun oleh Kementerian Perhubungan nanti ya untuk APBN tahun 2025, supaya terjadi upaya peningkatan atau progres yang baik terhadap penggunaan APBN ketika kita tarik dengan apa namanya tadi tema yang berbunyi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tadi.

Yang kedua, kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung program strategis nasional PSN. Contoh misalnya IKN ya dan kawasan-kawasan strategis nasional lainnya ya dalam konteks kita mendukung peningkatan moda transportasi untuk kawasan-kawasan yang menjadi prioritas.

Yang ketiga, penggunaan beberapa sumber dana untuk penyelesaian kegiatan baik Rupiah murni, PNPB atau maupun SBSN yang tepat sasaran. Tentu kita berharap ini terkait dengan program-program prioritas tadi ya, kita bisa fokus dengan program prioritas yang sudah ditetapkan yang kita bahas bersama. Terkadang di waktu berjalan muncul keinginan baru dari kunjungan kerja, permintaan masyarakat dan seterusnya, akhirnya program prioritas menjadi tema saja dan yang kita laksanakan justru tidak sama dengan apa yang sudah kita sepakati.

Yang keempat, beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan skema *multi-years* kontrak untuk menjamin kepastian penganggaran dan komitmen waktu penyelesaian. Kita berharap *multi-years contract* untuk masa pemerintahan yang sekarang bisa selesai di masa ini. Kita berharap ya, Pak Menteri, penggunaan APBN tahun 2024 ini, kita bicara 2024 ya, serapan 2024, kita berharap seluruh *multi-years contract* di Kementerian Perhubungan bisa di selesaikan sehingga tidak menjadi beban nanti pemerintahan berikutnya yang

kemungkinan punya program dan target yang berbeda dari apa yang sudah kita sepakati sekarang. Terima kasih, Pak Ridwan.

Yang kelima, perlunya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang perhubungan, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta mendorong *stakeholder* untuk berpihak pada pengembangan infrastruktur konektivitas di daerah tertinggal untuk mengurangi keterisolasian. Ya, saya rasa juga perhatian kita kepada daerah tertinggal perlu kita tingkatkan dalam penggunaan atau optimalisasi penggunaan pembiayaan.

Terkait sumber daya manusia pada kesempatan ini, Pak Menteri, kami berharap seluruh sekolah-sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan beberapa waktu yang lalu, kita sama-sama ramai terkait dengan yang terjadi di salah satu sekolah Kementerian Perhubungan, ada siswa yang meninggal karena perlakuan oleh teman atau seniornya, ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Tentu pada kesempatan ini kami juga berharap ini yang terakhir dan saya waktu itu sempat telepon-telepon dengan Pak Sekjen ya, saya tidak mau mengganggu Pak Menteri, saya telepon Pak Sekjen, Pak Sekjen saya bilang tolong ini dilakukan evaluasi secara menyeluruh ya terkait SOP dan seterusnya supaya ini jangan sampai terjadi lagi.

Orang tua mengirim anaknya ke sana, keluarga mengirim anaknya ke sana, tujuan utama mereka adalah bagaimana nanti ketika yang bersangkutan selesai terus menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi orang tuanya di masa tua, membiayai adiknya, dan seterusnya, terus mimpi itu berakhir dengan hal-hal seperti ini, karena lemahnya pengawasan dan seterusnya.

Tentu ini kita berharap pada kesempatan yang berbahagia ini kami menekankan, ini semoga yang terakhir dan tidak ada lagi yang boleh terjadi perbaikan sistem standar operasional prosedur dan seterusnya harus mengarah kepada tidak ada lagi ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Saya rasa kita masih punya banyak cara untuk mendidik mereka agar kelak menjadi orang-orang hebat dengan cara-cara yang lebih manusiawi.

Bapak-Ibu sekalian,

Selanjutnya, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara Menteri Perhubungan, sekarang yang hadir sudah cukup memenuhi kuorum, sudah bisa untuk mendengarkan paparan dari Pak Menteri terkait dengan agenda rapat kita hari ini yaitu evaluasi APBN tahun 2024 dan rencana kerja pemerintah untuk APBN tahun 2025.

Dengan penuh hormat kepada Pak Menteri, kami persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Bissmillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya, dan
Salam kebajikan,
Salam Pancasila.

Bapak Ketua,
Bapak Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi V yang saya hormati dan saya banggakan,

Saya sangat bahagia hari ini kita bisa berjumpa yang dengan berkat, kesempatan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan tentu kita diberikan rahmat dan karunia, sehingga kita sehat dan melakukan rapat kerja evaluasi pelaksanaan APBN 2024 dan pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan rencana kerja 2025. Beberapa topik sangat menarik dan menurut hemat saya penting kami laporkan dan minta *support* dari Komisi V, agar hal-hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bisa kita hadapi bersama.

Slide 4.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Dapat kami sampaikan bahwa, Kementerian Perhubungan 2024 memiliki anggaran sebanyak 38,6 triliun, namun pagu anggaran tersebut ada penambahan saldo dan sebagainya, sehingga kita dianggarkan sebesar 42,5 triliun.

Lalu kami laporkan juga bahwa sumber dananya ada Rupiah murni sebanyak 55% atau 23 triliun, SBSN 11 triliun, PNBPN sebanyak 4,2 triliun, BLU 1,8 triliun, PHLN 2,3 triliun dan dari hal tersebut dirinci 19 triliun merupakan belanja modal, lalu belanja, belanja-belanja barang 19, belanja modal itu adalah 19,5 dan belanja pegawai 4,1 triliun.

Slide 5. Kami sampaikan realisasi daripada 31 Mei 2024 sebanyak 32% atau 13,7 triliun, hal ini 2% dari rencana yang kita rencanakan. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih pada teman-teman yang melakukan penyerapan yang lebih tinggi dan hal tersebut terbagi pada biaya pegawai, biaya barang dan juga biaya modal.

Dari sisi sumber dana, Rupiah murni merupakan hal yang paling besar 35%, PNPB 15,9%, ini kita harapkan kita sedang ingin minta kenaikan utilisasi dari PNBPN. Jadi kita harapkan PNBPN naik, tetapi persentase daripada PNBPN itu merupakan sumber dana yang sangat efektif yang bisa kita lakukan dimana itu upaya dari rekan-rekan untuk melakukan.

SBSN ini sebanyak 28%, BLU sebanyak 27%, ini juga kami akan usulkan untuk ditingkatkan karena dengan adanya BLU maka remunerasi daripada para teman-teman yang bekerja di BLU itu meningkat sangat signifikan dan membuat kinerjanya bertambah baik. PHLN sendiri sebanyak 54% didominasi pada pekerjaan-pekerjaan bantuan luar negeri di pelabuhan dan juga di kereta api. Hal yang ingin saya tambahkan bahwa sampai bulan Mei ini kita mencapai suatu pencapaian 13,7 atau deviasi positif sebanyak 1,7 triliun.

Slide ke-6. Kami sampaikan juga bahwa target PNBP dan BLU di Kementerian Perhubungan sebanyak 10,4 triliun dan prognosanya kita akan tingkatkan menjadi 11,2 triliun dan hingga 31 Mei sudah tercapai 4,7% atau 45%, ini tentu di atas rencana yang sudah direncanakan. Terlihat dari grafik di situ bahwa PNBP dan BLU, yang angka merah itu adalah realisasi, sedang yang biru adalah prognosa yang kita lakukan.

Slide 7. Kita sampaikan juga bahwa secara umum ada langkah-langkah strategis antara lain meningkatkan kedisiplinan untuk penyerapan anggaran, kualitas belanja, *monitoring* dan evaluasi, dan percepatan penyelesaian pekerjaan, serta akselerasi pelaksanaan program kegiatan maupun *project*.

Slide 9. Ini kita mulai bicara tentang 2025 ada isu yang lumayan signifikan disampaikan oleh Pak Ketua, ada penurunan sebanyak dari 38 menjadi 24, sangat tinggi. Tentu ini mengganggu program-program yang sudah dicanangkan dan kita harapkan bantuan dari Bapak-Ibu dari Komisi V untuk membantu dan kami bersiap untuk memberikan data-data berkaitan program apa saja yang sekiranya wajib untuk kita lakukan.

Bapak-Ibu sekalian,

Kita juga berupaya mewujudkan tiga poin utama daripada itu yaitu SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Slide 10. Selain itu, kerangka pembangunan transportasi pada 2025 sampai 2029 fokus pada tiga aspek yaitu tetap pada infrastruktur dasar, infrastruktur pendukung, transportasi ekonomi dan infrastruktur perkotaan, serta mendukung utama adalah pengembangan SDM dan juga berkaitan dengan daerah tertinggal.

Slide 11. Kami sampaikan bahwa surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas disampaikan, kami mendapatkan 24 triliun dan dari situ terlihat komposisi belanja pegawai, barang dan modal cenderung menurun, terutama apabila belanja modal itu turun maka produktivitas atau keberlanjutan dari program-program yang ada itu akan terganggu.

Bapak-Ibu sekalian,

Kami sampaikan bahwa, sekali lagi Rupiah murni sebanyak 50% atau 14, 12 triliun, PNBP 18 triliun *eh* 24,3 triliun, BLU 1,9 triliun, PLN 4 triliun dan juga SBSN sebanyak 1,9 triliun. Terlihat dari sini ada penurunan SBSN yang

sangat drastis, sedangkan rincian pagu berdasarkan kegiatan itu berkaitan dengan manajemen sebanyak 11,1 triliun, pendidikan sebanyak 6 triliun dan infrastruktur konektivitas sebanyak 12,1 triliun.

Slide 12.

Bapak Ketua,
Bapak Wakil Ketua, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Secara keseluruhan, pagu indikatif tahun 2025 pada dasarnya terlihat menurun 13 triliun atau 35 triliun, 35%, dan di sini seperti saya sampaikan tadi SBSN dan Rupiah murni signifikan menurun dibandingkan dengan 2024. Rupiah murni itu turun sebanyak 1,5 triliun, lalu vokasi itu juga terjadi penurunan dan juga SBSN terjadi penurunan yang signifikan 80%.

Slide ke-13. Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah 2025, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kementerian Perhubungan berupaya untuk melaksanakan pokok-pokok dalam kebijakan umum bekerja 2025 antara lain:

- Memastikan pemanfaatan belanja tema dan arah kebijakan RKP;
- Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif dan akuntabel dan hal lain yang perlu kita sampaikan bahwa kita membutuhkan belanja yang lebih besar.

Slide 14. Sebagai *highlight* yang akan dilakukan oleh darat, itu berkaitan dengan infrastruktur dan sarana baru, implementasi angkutan massal perkotaan di beberapa kota dan juga konektivitas di daerah terpencil dan kami akan mengupayakan *safety* yang lebih baik, sehingga berkurang atau meniadakan kecelakaan-kecelakaan yang ada. Dari kereta api pemenuhan *available payment* harus dilakukan dengan baik dan juga peningkatan keselamatan kereta api.

Sektor laut, lanjutan pembangunan pengembangan *replacement* atau rehabilitasi pelabuhan. Kita tahu bahwa pelabuhan menjadi suatu titik penting berkaitan dengan konektivitas baik penumpang dan juga barang terutama di Indonesia bagian timur, di mana kita memberikan subsidi yang besar di Indonesia bagian timur.

Sektor udara. Pemenuhan belanja pemeliharaan sarana prasarana dipentingkan dan kita akan melakukan pengembangan bandara terbatas dan juga kita akan melakukan, merawat bandara-bandara agar bencana dan isolasi itu bisa ditempuh dengan baik dan di sini juga ada subsidi perintis untuk angkutan di Papua dan Sulawesi dan Kalimantan Utara.

Slide 15.

Bapak Ketua,
Bapak Wakil Ketua, dan

Anggota Komisi V yang saya hormati,

Sebagaimana yang disampaikan bahwa pagu indikatif 2025 mengalami penurunan signifikan, kami memahami bahwa hampir seluruh kementerian. Namun demikian, dalam kesempatan baik ini, izinkan saya menyampaikan bahwa masih terdapat prioritas yang mendasar belum terakomodir dalam pagu indikatif antara lain layanan prinitis dan IMO.

Melalui surat kepada Menteri Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran, kegiatan prioritas belum terakomodir pada tahun 2025 sebanyak 15,75.

Jadi sekali lagi Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para Anggota, kita sudah melayangkan surat ke Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas agar kita diberikan tambahan sebanyak 15,7 triliun yang relatif sama dengan tahun 2024, agar apa yang kita lakukan ini bisa terlaksana dengan baik.

Bapak-Ibu yang saya banggakan,

Untuk meningkatkan produktivitas daripada perolehan dana, maka Kementerian Perhubungan secara agresif melakukan upaya *creative financing*. Baru tadi pagi saya ketemu dengan teman-teman dari Jepang untuk melaksanakan kegiatan KPBU, yaitu kerja sama, kerja sama pemerintah untuk usaha bersama baik di laut, udara, kereta api maupun di darat.

Lalu, kita juga memiliki upaya skema yang namanya kerja sama pemanfaatan ya, terutama banyak di pelabuhan dan di situ dengan dilakukan itu, maka APBN yang tadinya merupakan anggaran dari Kementerian Perhubungan bisa digunakan untuk pelabuhan-pelabuhan yang juga bisa di tempat yang terisolir.

Upaya membuat BLU seperti yang saya sampaikan tadi ini sangat penting, karena mengingat satu sisi *take home pay* atau remunerasi daripada teman-teman ini tidak maksimal dan baru 80%, tetapi dengan BLU ini nanti dengan usahanya sendiri mereka bisa mendapatkan remunerasi lebih tinggi dan praktis lebih memudahkan proses daripada penyerapan karena dana-dana yang tadinya PNPB harus disampaikan Kementerian Keuangan, melalui BLU ini masing-masing sektor bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prioritas yang sudah direncanakan.

Oleh karenanya, kami sampaikan bahwa rincian prioritas yang belum terakomodir yaitu layanan keperintisan seluruh moda. Layanan keperintisan ini sensitif berkaitan dengan laut, ada tol laut di situ, juga ada di udara ada tol udara di Papua, di Sulawesi dan di Kalimantan Timur dan juga di sebagian Sumatera, untuk kereta api juga termasuk di sini KRL dari Jakarta itu adalah bagian dari subsidi yang harus dipenuhi.

Pengoperasian dan perawatan kereta api milik negara, yaitu IMO juga belum terpenuhi. Pengadaan bus relatif belum ada, pengadaan pemasangan

pelengkapan jalan belum tersedia, penyelenggaraan angkutan lebaran dan natal juga belum ter-cover dengan baik, lalu belanja pegawai dalam rangka pemeliharaan aset belum dipenuhi, fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi masih terabaikan, peningkatan SDM transportasi berupa diklat yang kita rencanakan untuk masyarakat dan juga untuk PNS belum terlayani, belum ter-cover, prioritas nasional, KEK dan perbatasan KSPN belum terlayani, dan juga kerangka regulasi daripada kerangka kelembagaan.

Dapat kami sampaikan juga bahwa, pelayanan perintis yang belum terakomodir dalam pagu indikatif sebesar 4,2 triliun dan semua moda membutuhkan pengoperasian perawatan barang milik negara sebanyak 4,4 triliun. Jadi dari sini saja ada 8 triliun yang belum terpenuhi.

Bapak-Ibu sekalian,

Kami memang tidak tinggal diam dengan ini, kita berupaya untuk berapapun kita berupaya, tetapi apabila ini diberikan kesempatan kami akan memberikan satu nilai apa angka-angka kuantitatif dari upaya-upaya yang akan kami usulkan.

Menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi berkaitan dengan *concern* yang harus kita lakukan. Berkaitan dengan PSN, *alhamdulillah*, kita sudah menyelesaikan sebagian besar dari PSN yang berjumlah 35, jadi akan selesai 29, masih ada 6 PSN di antaranya yang saya ingat adalah satu di Jambi, yang satu lagi di Sumatera Selatan dan beberapa tempat yang lain dan ini membutuhkan juga APBN yang tadi saya sampaikan.

Tepat sasaran, saya setuju sekali dan kami secara intensif membahas efektivitas daripada penyerapan ini, bahkan tidak segan-segan untuk merubah progres ini agar sasaran itu tetap diselesaikan.

Program prioritas juga menjadi satu hal yang kami pikirkan dengan baik, lalu kita juga melakukan upaya-upaya *multiyear*, sehingga dana-dana yang katakanlah bisa digunakan untuk proyek-proyek yang tidak mendapatkan anggaran bisa dialokasi dari upaya kita melakukan *multiyears*.

Tadi banyak disampaikan berkaitan dengan SDM. Betul, Pak, jadi apa yang terjadi pada STIP Marunda, kami mohon maaf dan ini merupakan kejadian dan peristiwa pelajaran yang besar pada kami. Oleh karenanya, kami secara signifikan melakukan suatu perubahan yang melibatkan internal dan eksternal, jadi pakar-pakar eksternal juga kita undang dan kita akan melakukan upaya-upaya menyeluruh.

Secara garis besar kita akan menetapkan atau menambah silabus hal-hal yang bukan masalah teknis, tetapi adik-adik kita bisa mengerti tentang ekonomi, legal, kemasyarakatan dan pada prinsipnya kita memberikan pendidikan yang lebih humanis dibandingkan apa yang ada di sini. Saya juga sepakat berkaitan dengan SOP harus diperbaiki dan secara teknologi kita juga akan memperkenalkan IT lebih signifikan, juga *internet of things* pada mereka, sehingga mereka saat belajar di dunia internasional sudah melakukan ini.

Tidak cukup di situ, kita sudah melakukan sosialisasi 3 tempat dari 5 tempat yang belum, yang ada. Kami sudah melakukan di Bali, di Surabaya dan di Jakarta, saya akan melakukan sosialisasi langsung di Makassar dan di Medan dan SDM menjadi satu kunci juga. Kami juga akan meminta kepada teman-teman BPSDM bekerja sama dengan teman-teman di operasional untuk meningkatkan SDM, sehingga kami sudah mulai dengan satu program *talent* program, di mana 180 orang terbaik dari Eselon III dan IV, kami berikan suatu pendidikan selama beberapa hari dan ini akan diteruskan dan saya ingatkan kepada teman-teman Dirjen dan kepala badan untuk secara sistematis melakukan upaya-upaya ini agar konsistensi kita tentang meningkatkan SDM ini menjadi penting.

Lalu terakhir, daerah tertinggal selalu menjadi *concern* pada kami. Banyak sekali bandara-bandara yang kita bangun, tercatat ada di Papua banyak sekali, lalu di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan juga di Maluku, NTT, NTB, dan beberapa sudah kita terapkan KPBU, satu yang sudah terbangun adalah di Kediri, yang sedang berlangsung itu di Kepri dan juga ada Kalimantan Barat, dana *sharing* antara pemerintah dan swasta membangun dan ini semua bisa menjadi contoh bagi dunia swasta bahwa swasta bisa membangun prasarana, apakah itu bandara, pelabuhan, kereta api dan juga kegiatan-kegiatan di darat.

Bapak-Ibu sekalian yang saya banggakan,

Itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya dan teman-teman mengharapkan masukan, arahan dan saran dari Bapak-Ibu sekalian agar kami bisa melaksanakan kegiatan ini lebih baik di tahun 2024 dan mempersiapkan tahun 2025 dengan baik pula dan tidak kalah pentingnya seperti tahun 2024 sekarang.

Terima kasih.

Selamat pagi,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Selamat siang,

Terima kasih, Pak Menteri atas paparannya.

Sebelum saya ke Anggota, tentu saya tidak ingin membahas apa yang apa, tidak ingin mengulas apa yang Pak Menteri sudah sampaikan biar nanti Pimpinan dan Anggota yang akan menanggapi.

Sebelum ke Anggota, saya ingin menyampaikan untuk bisa dijadwalkan kembali di jadwal rapat kita, Bu Nunik, Bu Sekretariat ya, ada surat dari Presiden Republik Indonesia ya, tertanggal 2 Mei 2024, ditujukan ke Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan Nomor: R-16/Pres/05/2024, sifatnya segera, lampiran satu berkas, perihal: Rencana Pengesahan..., Rencana Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Paket ke-12 Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa. Ini ditujukan kepada Komisi V oleh Pimpinan DPR RI, ya.

Surat ini saya rasa tidak perlu saya bacakan. Intinya kita perlu mengesahkan protokol untuk melaksanakan paket ke-12 terkait komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa. Oleh karenanya, nanti kepada Sekretariat ini tolong diagendakan dan ini pemberitahuan juga kepada Pak Menteri Perhubungan, saya yakin ini dari Kementerian Perhubungan ya asalnya, untuk bisa diagendakan dengan menghadirkan pihak-pihak yang memang seharusnya kita hadirkan seperti Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain yang berkaitan dengan ini, nanti kita alokasikan waktunya.

Selanjutnya, saya persilakan kepada seluruh Anggota untuk langsung saja, singkat, padat, jelas menanggapi apa yang sudah Pak Menteri tadi sampaikan, karena nanti jam 2, jadwalnya *sih* jam 3, saya berharap kalau bisa jam 2 siang nanti kita sudah bisa mulai dengan agenda kita yang kedua, yang juga dengan Pak Menteri Perhubungan terkait dengan evaluasi mudik dan balik lebaran.

Yang pertama, Pak Ali Mufthi, Pak Ali Mufthi ada?

Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Muhammad Aras, ada Pak Muhamad Aras? Masih keluar, kalau Pak Muhammad Aras enggak ada Pak Syahrul Aidi.

Saya persilakan, Pak Ali Mufti.

F-PG (DR. H. ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V beserta seluruh Anggota,
Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran,

Terima kasih atas waktunya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya merasa prihatin Kementerian Perhubungan ini kenapa anggarannya turun sampai kurang 15 triliun lebih tadi itu. Kenapa sampai terjadi begitu? kalau dalam ilmu fikih itu pendapatan hari ini dan ke depan turun itu masuk kategori miskin, itu ilmu fikih. Apakah kementerian ini akan masuk dalam kategori kementerian miskin, saya pikir tidak.

Ada hal yang ingin di perlu dijelaskan, Pak Menteri, kenapa *sih kok* selalu pagu indikatif itu dari 1 tahun, dari tahun ke tahun itu selalu turun dari anggaran sebelumnya. Saya ingin tahu bagaimana mekanisme proses penganggaran antara Kementerian Perhubungan, Bappenas dan Kementerian Keuangan, sehingga terjadi apa yang disebut dengan penurunan anggaran. Itu yang pertama yang nanti perlu dijelaskan.

Yang kedua, apakah 15 triliun tadi itu penting, di tahun kemarin menjadi tidak penting di tahun 2025. Ya, yang, yang dipertegas lagi tadi saya baca di *slide*-nya Bapak, yang keberapa tadi itu, yang masuk 15 triliun itu adalah yang selama ini kita bisa mengusulkan aspirasinya lah, paling tidak, yaitu bus sekolah sama apa, pengadaan untuk jalan. Kalau tafsir saya itu mungkin yang PJU itu. Apakah tidak, misal begini, apakah yang bus sekolah dan yang tadi PJU itu jangan dimasukkan yang 15 triliun? masukkan yang 24, *nah*, begitu Pak, atau kenapa yang selama ini ya kita bisa menyampaikan aspirasi dimasukkan di angka penurunan 15 triliun itu di bantu komisi nambah anggaran atau misal gitu ya. *Nah*, logika-logika ini penting biar kita ini bisa mengikuti secara baik alur cerita dari penganggaran yang ada saat ini.

Berikutnya,

Pak Ketua,
Pimpinan, dan
Pak Menteri yang saya hormati,

Jadi yang saya tiga yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan terminal golongan A yang di Dapil saya ini, ini perlu ada apresiasi dan perlu ada perhatian dari Dirjen Darat, karena berdasarkan laporan yang masuk ke saya, banyak bus yang enggak masuk ke terminal. *Nah*, ini perlu ada penertiban Pak Dirjen, Pak Menteri, atau butuh revitalisasi terminal itu, sehingga orang bisa nyaman, orang bisa berkreasi di, berekreasi atau ber-*healing* di terminal itu, sehingga bus itu juga akan masuk. Kalau di dalam terminal enggak ada orang, tentu bus itu juga tidak akan mau masuk.

Nah, oleh karena itu, khusus yang di Dapil saya, Kabupaten Ponorogo, 2025 ini saya mengusul ada revitalisasi terminal itu, seperti yang di Madiun lah paling enggak apa masyarakat itu ada perasaan ingin masuk terminal, agar bus juga masuk terminal itu akan ada efek-efek positifnya.

Saya pikir itu, Pak Pimpinan, Pak Menteri dan Bapak-Ibu sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan *stressing*-nya adalah bus sekolah dan PJU itu masuk di angka 24, jangan dimasukkan di angka 2 yang 15.

Yang kedua, saya 2024 ini, Pak Menteri dan Pak Dirjen Darat, di kabupaten saya di Ponorogo itu ada jalan nasional yang belum ada PJU-nya, mohon nanti itu di apa di-perhatikan dan dialokasikan.

Kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Ali Mufthi.

Pak Syahrul Aidi, bersiap-siap Pak Mesakh Mirin.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.C., M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Menteri Perhubungan beserta seluruh jajaran,

Kita apresiasi terhadap kinerja Pak Menteri di akhir periode Presiden ini, ini adalah tentu pembahasan kita yang terakhir, maka saya berharap Pak Ketua agar evaluasi kita tidak hanya evaluasi untuk tahun 2024 atau 2023, tetapi saat pembahasan bersama Dirjen nanti, kita minta evaluasinya satu periode ini.

Saya berharap ada data yang dipaparkan oleh setiap Dirjen nanti mulai dari, misalnya Dirjen Kelautan itu pelabuhan, berapa pelabuhan kita? berapa yang berfungsi? berapa yang diserahkan ke Pelindo? karena kami mendapat informasi juga, banyak pelabuhan yang sudah kita bangun tapi tidak fungsional. *Nah*, begitu juga di bandara misalnya perhubungan udara, berapa yang sudah kita bangun? berapa yang sudah fungsional? masih dalam apa namanya, penanganan dan operasional oleh Kementerian Perhubungan? Begitu juga dengan terminal, beberapa kunjungan kita ke terminal ini kita bangun biayanya besar, tapi fungsinya sangat kecil, *nah*, sehingga kita bisa melihat apa yang mesti kita perbaiki, mungkin saja tidak sarana dan prasarannya tetapi regulasinya yang harus kita perkuat.

Contoh terminal, kita banyak membangun terminal, tapi ternyata bis-bis itu tidak masuk dalam terminal. Dalam kunjungan kita, kita temukan hanya 30% bis itu yang masuk ke terminal. Saya tadinya berpikir ini hanya terjadi di Riau, tapi ternyata terjadi di banyak daerah. Jadi mohon nanti kepada Dirjen, saya butuh data, berapa *sih* pelabuhan kita? berapa *sih* dengan klasifikasinya ya, pelabuhan yang sudah berfungsi, yang belum, tidak fungsional, dan seterusnya.

Kemudian Pak Ketua, ini dalam catatan kami di Fraksi PKS, pertama menyoroti pergerakan barang di Indonesia masih didominasi oleh angkutan darat yaitu, sebesar 91%. Semangat kita adalah bagaimana kita menekan biaya logistik kita yang cukup tinggi. *Nah*, rumusnya ketika kita masih menggunakan angkutan darat, pasti biaya logistik kita besar, *nah*, maka *share*-nya untuk angkutan ini harusnya bagaimana kita memfungsikan kereta.

la

Dalam catatan kami, kereta angkutan itu masih, untuk logistik masih 0,7%, sementara di Amerika itu kereta angkutan barang di Amerika sebesar 28%, di Eropa 18%. Artinya kita belum memaksimalkan fungsi kereta api ini sebagai angkutan untuk bagaimana memurahkan biaya logistik kita. Begitu juga dengan perhubungan lautnya, bagaimana kita menggunakan, kita memfungsikan pelabuhan-pelabuhan kita untuk menekan biaya logistik kita, apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu tol laut itu belum berfungsi dengan maksimal.

Kemudian Fraksi PKS berharap angkutan kereta api dapat semakin meningkatkan kinerjanya, misalkan dengan naiknya *share* angkutan barang menjadi 11 sampai 13% pada 2030 sesuai target rencana induk perkeretaapian nasional, apalagi dengan dihapusnya PPN dari sektor perkeretaapian sejak diberlakukannya PP Nomor 50 Tahun 2019, sehingga angkutan kereta api dapat lebih murah dari sebelumnya. Fraksi PKS juga memandang perlunya migrasi teknologi dari kereta diesel ke kereta listrik seperti halnya migrasi mobil diesel ke listrik.

Kemudian, kami mengusulkan pembuatan regulasi baru tentang logistik yang saat ini sudah tidak kondusif. Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan, pengembangan sistem logistik nasional sudah tertinggal 10 tahun lamanya. Undang-undang bidang logistik perlu dipikirkan sebagai regulasi yang lebih umum, karena komponen transportasi sebagai bagian dari sistem logistik justru sudah diatur dalam bentuk undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang 23/2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang 17/2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.

Kami juga mempertanyakan tentang kegiatan prioritas yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif tahun 2025 di antaranya, satu, pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara, padahal saat ini tata kelola perawatan prasana perkeretaapian terindikasi sangat buruk, dibuktikan dengan kecelakaan kereta api Argo Semeru rute Surabaya Gubeng–Gibir..., Gibir dipicu oleh masalah pada bantal rel kereta api yang mengalami erosi.

Saat ini pemeliharaan prasarana masih tanggung jawab regulator, tetapi implementasinya dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan dana pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau infrastruktur *maintenance* dan *operation*. Dalam waktu bersamaan, KAI juga masih dibebankan membayar *Track Access Charge* atau TAC, yakni biaya yang harus dibayar pihaknya pada pemerintah atas prasana perkeretaapian.

Kemudian, kami juga mencatat terhadap evaluasi ini bahwa dalam waktu bersamaan, *eh* berpendapat, kami juga berpendapat seharusnya ada lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan prasarana perkeretaapian agar tidak ada tumpang tindih tugas antara pelayanan transportasi perkeretaapian serta pemeliharaan prasarana perkeretaapian,

sehingga diharapkan prasarana perkeretaapian dapat selalu terawat dengan baik.

Kemudian fasilitas keamanan dan keselamatan transportasi. Kami menyoroti temuan Kemenhub, bahwa masih banyak bus pariwisata yang tak memenuhi syarat administrasi kelayakan jalan, terutama di wilayah Jakarta, Banten, Kabupaten Bogor dan Riau. Catatannya, dari 67 bus yang diperiksa ada 12 bus atau 12% yang masa berlaku KIR-nya telah kadaluarsa. Ini perlu menjadi perhatian kita.

Kemudian kami meminta agar ada ketegasan dari Kemenhub untuk terhadap PO Bus yang bermasalah tersebut, misalkan dengan mencabut izin dan seterusnya, juga agar meminta Kemenhub membuat regulasi atau peraturan baru terkait sertifikasi keahlian bagi supir bus khususnya pariwisata, sampai sekarang itu keahlian sopir itu masih dilihat dari SIM ya.

Kemudian, PT Kereta Api Indonesia atau KAI saat ini terbebani oleh utang dari kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang semakin membesar, usai cairnya tambahan pinjaman dari *China Development Bank* untuk membayar pembengkakan biaya atau *cost over, over run*. Yang jadi masalah, selain harus menanggung cicilan utang pokok dan bunga ke Cina, KAI juga harus ikut menanggung biaya operasional, karena target penumpang masih berada di bawah target. Oleh sebab itu, PT KAI telah mengajukan permohonan sejumlah proposal keringanan biaya kepada pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan perseroan di antaranya proposal tersebut adalah KAI meminta penyertaan modal negara dari APBN.

Nah, yang menjadi catatan kami, memperhatikan, kami memperhatikan besaran dana IMO yang selama ini dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bersama PT KAI memang tak banyak mengalami perubahan signifikan selama beberapa tahun terakhir, misalnya 2015 1.471 miliar; pada 2016 1 triliun..., 1,65 triliun; 2017 1,65 triliun; 2018 1,3; 2020 1,5; tetapi mengapa tiba-tiba terjadi lonjakan anggaran IMO ini menjadi 4,46 triliun saat ini, ya. *Nah*, ini kami mempertanyakan, apakah ini diakibatkan oleh beban yang harus ditanggung oleh pemerintah terhadap kereta cepat atau bagaimana.

Demikian beberapa catatan dan kritikan kami, evaluasi kita terhadap anggaran baik 2024.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Syahrul Aidi.

PR-nya cukup banyak untuk kereta api, ya. Kereta cepat ini memang saya termasuk, karena Ketua komisi ya, yang sering kali ditanya ke saya, Pak Lasarus, ini kapan *break-even point*-nya, BEP-nya kapan? Nah, ini kan kalau nanya BEP ini kan masih komponen-komponen yang tadi Pak Syahrul Aidi bacakan itu, itu adalah bagian dari proses apakah cepat atau lambat *break-even point* ini akan terjadi terkait kereta cepat ini.

Nah, sekarang disampaikan keluhan oleh PT Kereta Api, jangan sampai gara-gara kereta cepat ini, lalu kolap PT KAI, begitu maksudnya Pak Syahrul, ya? Ini saya rasa persoalan serius yang harus kita selesaikan ya, karena seyogyanya tugas utama dari PT KAI ini adalah melayani rute-rute yang sudah ada sebetulnya yang dalam hal ini mereka cukup *profitable* sebetulnya, walaupun kita masih ada subsidi di sana ya, tapi karena beban kereta cepat dan setahu saya, Pak Syahrul, keterlibatan PT KAI ini penugasan, Pak, bukan pilihan bisnis ya, ini tentu akan menjadi masalah serius ke depan. Kalau terakhir harus minta PMN, terus rugi nanti minta PMN, rugi minta PMN, ini juga soal. Saya rasa nanti di forum yang berbeda saja kita dalam ini ya.

Pertanyaan Pak Syahrul makin banyak angka jumlah pertanyaan yang Bapak bacakan tadi kepala saya semakin pusing, Pak, di sini, jadi syukurlah Bapak cepat selesai tadi.

Kemudian selanjutnya Pak Mesakh Mirin, mudah-mudahan dari Papua tidak terlalu panjang ya.

F-PAN (MESAKH MIRIN):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Wakil Pimpinan, serta
Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Pak Menteri dan jajarannya,

Sangat berterima kasih Pak Menteri selama kita di ini atas perkembangan program yang Kementerian Perhubungan walaupun keterbatasan anggaran menurut Pak Menteri tapi masih bisa berjalan baik selama hampir kurang lebih 5 tahun ini.

Pak Ketua, saya langsung spesifik saja mungkin untuk secara garis besar untuk hanya Papua. Terima kasih, karena dari 38 provinsi di Indonesia ini Pak Menteri dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI hanya 1 provinsi di Indonesia yang tidak langsung berbatasan dengan laut, pasti tentu itu Provinsi Papua pegunungan ya, sehingga mungkin saya lebih fokusnya mungkin ke transportasi apa udara, lebih spesifik lagi perintis dan dua hal di sini yang saya ingin mau sampaikan. Pak Menteri, terima kasih dan ini mungkin saya transparan aja, buka-bukaan saja ini, Pak Menteri.

Program tahun 2022 itu ada beberapa provinsi, *eh* berapa kabupaten di Papua itu, Pak, karena hampir salah satu kabupaten itu, 51 distrik itu hanya 10 menit saja itu, Pak, itu hanya cuma 20 juta saja, 10 menit dari satu kabupaten itu ke kecamatan saja 10 juta, Pak. Kalau itu sistem apa namanya, charteran kayak gitu, maka kita ada program yang namanya subsidi itu, Pak, dan Pak Sekjen itu tahu persis ketika begitu ada Pemilu atau dan lain sebagainya, sehingga memang Pak Sekjen tahu persis karena anggaran yang subsidi ini tidak digunakan baik oleh masyarakat, karena masyarakat itu sebagai subjek pembangunan. Tapi hari ini khusus untuk Papua Pegunungan itu objek, dipakai oleh pemerintah sedangkan subsidi-subsidi ini kegunaannya untuk masyarakat dan Pak Sekjen itu tahu sendiri saya *ngeluh* terus setiap waktu, pada waktu itu.

Nah, ini harus evaluasi total Pak Menteri, jajarannya ini, karena subsidi-subsidi itu digunakan langsung dipakai oleh pemerintah, dalam hal ini bupati-bupati dan Pak Sekjen ini saya tahu persis, saya waktu itu langsung saya langsung komplain terus ya, Pak Sekjen, kenapa ini digunakan oleh pemerintah, sedangkan ini untuk masyarakat. *Nah*, hal-hal seperti ini, Pak Menteri, tolong evaluasi secara total khusus untuk Papua Pegunungan, ini yang terjadi Pak, Pak, Pak Menteri harus ketahui, sehingga masyarakat ini jadi objek. Itu yang pertama.

Yang kedua, beberapa lapangan terbang, tadi tahun 2022 anggaran, salah satu saja, saya sebutkan ya, karena saya sudah keliling 51 distrik itu satu hari saya pakai pesawat kecil itu, saya keliling lihat 40 miliar sampai 60 miliar, kemarin tahun 2023 di Sobaham realisasinya tidak. Lah, ini harus diperiksa juga, itu tahun 2022 *loh*, ini tidak jalan, baru tahun kemarin itu 100 M ini tidak realisasi *nih*, distrik Sobaham, distrik Sobaham di Kabupaten Yahukimo, uangnya kemanain Pak Menteri dan jajarannya? uang itu ke mana?

Nah, ini harus dievaluasi ulang, uangnya kemanakan. Jadi kalau bilang di Papua susah, uangnya besar-besaran *kok*, tapi realisasi di lapangan tidak ada. Hari ini fakta, Pak, dan videonya saya kirim, waktu itu saya bilang ini anggaran, Pak, 2022, anggaran 6 miliar di Kementerian PUPR, kita sama-sama sahkan, realisasinya tidak ada, coba cek video saya bisa putar sini, uangnya itu ke mana? Terus tahun kemarin 100 miliar, realisasinya seperti apa, ini Pak Menteri evaluasi secara total ini untuk di Papua Pegunungan *loh*. Jangan masyarakat Papua di pedalaman ini jadi objek untuk kepentingan, tetapi realisasinya tidak ada, ini fakta.

Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon maaf, Pak Ketua, ini fakta yang saya ingin bisa sampaikan seperti itu. Jadi, terima kasih untuk kita evaluasi pertama subsidi untuk masyarakat Papua Pegunungan pedalaman itu.

Yang kedua tentang anggaran-anggaran yang sudah disahkan tapi realisasi tidak ada dari tahun 2022 sampai hari ini belum realisasi, anggaran itu ke mana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, Pak ya Pak Mesakh Mirin.

Nanti ajak saya ke sana, Pak ya, kita terbang. Kebetulan saya belum pernah *nih*, ke, ke Papua, *nih*, satu-satunya provinsi yang tidak ada berbatasan dengan laut. Danau ada di sana, Pak? danau ada enggak? danau, *oh* tidak ada juga, sungai banyak? *oh* sungai ada ya, ya paling enggak kita bisa berendamlah di sungai di sana, hutannya masih banyak kan, Pak ya? Ya, masukan dari beliau soal anggaran.

Terima kasih, Pak Mesakh Mirin.

Sekarang dari Papua kita menuju ke timur lagi, dari Maluku silakan Ibu Iren. Selamat ulang tahun Bu Iren.

F-PDI PERJUANGAN (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS., MCOMN&MEDIASST.):

Salah, Pak, 4 April saya.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

4 April ya, *oh* kirain.

F-PDI PERJUANGAN (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS., MCOMN&MEDIASST.):

4 Juni, tapi terima kasih untuk doanya.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Kemarin kan saya lihat di grup *kok* ulang tahun ini Bu enggak ngundang-undang kita, gitu, Ketua Komisi.

F-PDI PERJUANGAN (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS., MCOMN&MEDIASST.):

Tidak menolak kado, Pak, kalau diberi walupun salah ulang tahun.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, makanya Ketua Komisi enggak dikasih tahu ulang tahun, diam-diam aja.

Silakan Bu Iren ya, bersiap-siap nanti Pak An'im Falachuddin.

F-PDI PERJUANGAN (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS., MCOMN&MEDIASST.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Selamat siang,

Pak Menteri yang saya hormati beserta jajarannya,

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, menambah catatan dari teman-teman yang sepertinya sudah sangat lengkap.

Pertama, tema RKP 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Relevansi Kementerian Perhubungan di sini adalah infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan menyediakan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, khususnya terkait dengan integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.

Dari pernyataan ini, Pak, yang perlu saya garis bawahi adalah infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi. Jadi saya ingin Pak Menteri menempatkan kawasan Indonesia Timur itu menjadi salah satu fokusnya, karena seperti kita tahu ada banyak pertumbuhan baru misalnya kalau di Dapil saya itu sektor pertambangan itu mulai bermunculan dan ini memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan untuk satu Provinsi Maluku Utara.

Jadi Maluku Utara itu termasuk yang menjadi cadangan nikel terbesar di Indonesia dan di sini dalam hal ini Pulau Halmahera sekarang sedang, kalau saya enggak boleh mengatakan eksploitasi ya dieksplorasi dengan sangat besar-besaran, padahal kita tahu infrastruktur konektivitas di Pulau Halmahera masih sangat memperhatikan.

Beberapa kali Pak Menteri juga datang ke provinsi kami, di Dapil kami dan Pak Menteri melihat dengan jelas bagaimana konektivitas itu masih menjadi tantangan yang belum bisa dijawab oleh pemerintah saat ini. Jadi harapan saya, Pak Menteri, besar harapan saya yaitu pulau utama di Maluku Utara yaitu Halmahera bisa mendapatkan perhatian lebih dalam tahun anggaran 2025 ini.

Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Menteri Perhubungan dan jajaran, terutama Dirjen Perhubungan Laut atas penambahan anggaran untuk 2024 bagi Maluku Utara, khususnya untuk renovasi Pelabuhan Semut Ternate, tetapi sayangnya, Pak, yang perlu diperhatikan sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan, pekerjaan itu belum dilakukan. Harapannya, tentu realisasi itu akan terlaksana dengan segera, Pak, karena Pelabuhan Semut Ternate merupakan salah satu fasilitas penyeberangan paling ramai di Maluku Utara, itu nadi kami, Pak, jadi tolong diperhatikan, terima kasih.

Lalu yang ketiga, usulan saya untuk tahun anggaran 2025 yang semuanya usulan ini terkait dengan peningkatan aktivitas ekonomi di Maluku Utara. Yang pertama untuk Kabupaten Halmahera Barat, ini menindaklanjuti permohonan saya pada RDP yang lalu tentang permohonan alat bongkar muat untuk mendukung program tol laut di Pelabuhan Jayalolo Halmahera Barat. Saya mendapatkan informasi bahwa sebenarnya sudah masuk ke pagu indikatif tetapi sampai saat ini juga kami belum mendapatkan informasi mengenai pelaksanaannya kapan.

Lalu, Pak, tadi juga disinggung bahwa tol laut ini menjadi salah satu program yang bisa dikatakan sangat membantu kami, tetapi kadang kala pelayanan tol laut ini tidak dibarengi oleh pelayanan-pelayanan lain sehingga masyarakat itu belum mendapatkan pelayanan yang maksimal. Sempat pada waktu Raker yang lalu, saya memohon pengadaan *forklift* ya, Pak, untuk kendaraan tronton ini, sehingga pembongkar muatan kapal laut ini bisa terbantu dan itu di Jailolo kita belum memiliki fasilitas tersebut, Pak.

Lalu yang kedua, Pak, masih sama dari Halmahera Barat ini terkait dengan KM Dorolonda. Ini terima kasih, Pak, kami sangat mengapresiasi karena Dorolonda masuk ke Jailolo, tetapi ada beberapa yang saya pikir juga perlu ditambahi yaitu fasilitas di Pelabuhan Jailolo karena masih terlalu sempit pelabuhan ini, Pak, untuk kapal sebesar Dorolonda bisa sandar, sehingga kami berharap percepatan survei lapangan studi untuk SID-nya, Pak, untuk pengerukan alur pelayaran dan juga kolam di Jailolo supaya KM Dorolonda ini bisa segera berlabuh dan itu saya harapkan, Pak, karena ini akan sangat membantu sekali untuk penumpang dan juga barang, terutama pelaku usaha Halmahera Barat yang rute akhirnya itu Jakarta dan Surabaya.

Jadi, ini mohon menjadi catatan, Pak, karena saya yakin kalau ini jalan baik, KM Dorolonda ini masyarakat juga menyambut sangat baik dan pasti secara peta ekonomi juga ini sangat membantu masyarakat di sana.

Lalu yang terakhir, Pak, untuk Halmahera Barat, ini untuk Pak Dirjen Perhubungan Darat. Kami memohon penambahan pelayaran penyeberangan kapal perintis dari Kedi, Halbar ke Bitung Sulawesi Utara pulang-pergi. Ini dibutuhkan sekali oleh masyarakat dan pelaku usaha untuk menghemat biaya pengiriman barang, karena selama ini pelaku usaha harus ke Ternate dulu. Jadi kalau ada rute Kedi, Halbar langsung ke Bitung tentu ini akan membantu sekali dan ini juga sudah ada surat permohonan dari Bapak kepala daerah dari bupatinya nanti akan saya serahkan selepas ini. Jadi, mohon perhatian Pak untuk penambahan rute pelayaran penyeberangan kapal perintis.

Lalu, Pak, terakhir mungkin ini, Pak Menteri, saya mohon sekali untuk Pulau Halmahera sebagai nadi ekonomi Maluku Utara khususnya, karena ada aktivitas tambang yang sangat besar di sana. Saya kembali mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk fasilitas keselamatan di jalan nasional Maluku Utara, karena masih banyak sekali jalan yang belum terpasang rambu jalan, marka jalan dan alat penerangan jalan, khususnya di jalan transnasional Halmahera.

Ini sudah pernah saya sampaikan dan ini saya sampaikan lagi, karena *urgent* mengingat jalan Trans Halmahera adalah jalur darat utama di Maluku Utara dan jalan Trans Halmahera ini menghubungkan Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat dan Halmahera Utara dan hingga saat ini masih banyak sekali, Pak, terjadi kecelakaan akibat banyaknya jalan berlubang dan kurangnya lambu-lambu, rambu-rambu lalu lintas seperti pembatas jalan, lampu penerangan dan yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi saya mohon perhatiannya, Pak Menteri. Demikian catatan dan usulan dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Bu Iren.

Ambon manise, dari Ambon manise sekarang kita menuju ke Pak An'im Falachuddin, Dapil mana Pak?

F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS):

Dapil Jatim VI, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oh, ke Jawa Timur ya, masih di arah ujung.

Silakan Pak Alachuddin.

F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan dan Anggota Komisi,

Terima kasih yang kami sampaikan juga kepada Bapak Menteri, beserta jajarannya,

Pertama-tama yang ingin kami sampaikan bahwa, melihat realisasi anggaran tahun 2024 di Kementerian Perhubungan yang mencapai 32% koma sekian, *kok* ada keserupaan dengan Kementerian Desa yang juga 30%, apakah ini karena memang sistem atau kebijaksanaan? kita minta penjelasannya.

Yang kedua, tadi sudah ditanyakan terkait tentang turunnya anggaran yang drastis sehingga hanya menjadi 24 koma sekian triliun dari anggaran yang sebelumnya, Pak. Ini perlu penjelasan.

Kemudian yang ketiga, saya juga ingin mempertanyakan apakah penyusunan program dan anggaran Kemenhub tahun 2025 sudah mempertimbangkan visi dan misi Presiden terpilih. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya revisi dan pergeseran program, program dan anggaran karena itu yang melaksanakan RKA yang kita bahas sekarang adalah pemerintahan baru.

Kemudian yang ingin kami soroti lagi di Dirjen Perhubungan Udara, kami ingin mengevaluasi banyaknya bandara-bandara yang dibangun di beberapa daerah di Blora dan daerah-daerah yang lainnya yang ternyata setelah menghabiskan anggaran yang demikian besar, tapi ternyata tidak berfungsi, apakah sudah ada solusi untuk agar bandara yang telah terbangun itu bisa memberikan manfaat yang jelas.

Yang kedua, otomatis dari banyaknya bandara yang terbengkalai ini, Pak, kami juga mengkritisi pengembangan bandara perbatasan rawan bencana dan terisolir, ini *kok* ada 4 lokasi, apa pertimbangannya, Pak? Yang jelas kalau mungkin pertimbangan faktor pertahanan dan keamanan mungkin kami tidak bisa komentar, tapi kalau pertimbangannya komersial dan efisiensi anggaran, saya kira ini tidak masuk akal. Begitu juga di daerah kami, Pak, *alhamdulillah*, terima kasih Bandara Kediri sudah beroperasi. Namun faktor pendukungnya, Pak, yang lamban, Pak, seperti pembangunan jalan tol Kediri–Kerton..., Kediri–Kertosono masih lambat perkembangannya, Pak. Itu yang kami sampaikan mohon bisa dijawab dengan jelas.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Falachuddin.

Selanjutnya dari Jawa Timur kita masih di Jawa Timur ya, dari Madura ini, Pak Syafiuddin. Dengar saya bilang dari Madura langsung bangun dia, silakan Pak Syafiuddin.

F-PKB (H. SYAFIIDDIN, S.SOS.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pak Ketua,
Wakil Ketua, beserta
Sahabat-sahabat Anggota Komisi V yang berbahagia,
Pak Menteri beserta jajaran juga yang sangat saya hormati,

Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mungkin pertemuan dengan Pak Menteri kurang sekitar dua kali apa tiga kali lagi, mungkin ya, jadi sangat beruntung bisa ketemu dengan Pak Menteri Perhubungan di forum yang berbahagia ini.

Pertama, saya ucapkan apresiasi karena beberapa aspirasi yang saya lakukan mulai dari tahun 2019 kita dilantik walaupun tidak seluruhnya diakomodir, namun kami tetap mengapresiasi kepada Menteri Perhubungan dan jajaran terutama bantuan bus sekolah untuk pondok-pondok pesantren di Madura, Pak Menteri, terima kasih banyak.

Yang kedua, kami tidak ingin terlalu jauh untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2024 dan juga terkait dengan rancangan atau rencana kerja untuk 2025, karena kita sama-sama paham bahwa, di dalam pagu anggaran ini sangat minimalis sekali perbandingan di tahun untuk tahun 2024 kemarin, kita lebih fokus kepada daerah pemilihan saya, Pak Menteri. Kami, saya pribadi tidak pernah capek untuk menyuarakan terkait dengan kabar rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Socah, juga reaktivasi rel kereta api yang tertera di Perpes 80.

Pak Menteri yang saya hormati,

Kalau di Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan mungkin ini dengan rencana anggaran yang sangat besar, reaktivasi yang kira-kira itu banyak hambatan-hambatanlah kira-kira. Namun, saya teringat bahwa selama saya jadi Anggota DPR mulai dari daerah sampai DPR RI 2029, 2000, *eh* 2009 pada waktu saya DPR kabupaten isu tentang pembangunan Pelabuhan Socah yang katanya, yang katanya, yang katanya ini apa namanya ada investor dari Cina dulu itu Cina *harbour* apa namanya, gitu, saya lupa, ini rencananya akan dioperasikan pada tahun 2013 kemarin gitu kan. Setelah itu saya jadi DPR RI 2019 ini juga *alhamdulillah* ada angin segar, karena masuk di dalam Perpres 80, tentunya ini kan regulasi yang sangat bagus walaupun bukan undang-undang.

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman saya dari kawasan Indonesia Timur tadi bahwa konektivitas pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia dengan adanya tol laut, sebetulnya Madura masuk di dalam kategori itu rencana Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, rencana Pelabuhan Socah seandainya diimplementasikan satu aja, maka itu tidak menutup kemungkinan bahwa Madura akan sama dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur.

Kalau tadi Mbak Irin mengatakan, bahwa dari kawasan Indonesia Timur pertumbuhan ekonomi apa namanya itu berat, kami masuk di kawasan Indonesia bagian barat namun nasib sama dengan kawasan Indonesia bagian timur, Pak Menteri. Pertumbuhan ekonomi sangat lambat, IPM sangat rendah dan semuanya ada di Madura.

Lagi-lagi kami pernah melakukan Kunspik teman-teman Komisi V ke Bangkalan pada waktu itu dan saya mengundang Bapak Menteri dan Dirjen dan dihadiri oleh salah satu Direktur. Saya pada waktu itu sangat kecewa, Pak Menteri, tapi saya *ndak* nyebut nama, ada orangnya di sini. Saya berpikir

bahwa begini seorang pejabat ini, Pak Menteri, sudah bagus, orangnya *soft*, sederhana, dan lain-lain. Setingkat Direktur *kok* sombongnya luar biasa pada waktu, tidak ada di sini orangnya, tapi saya tidak akan menunjuk, tidak akan menyebut nama. Paling penting itu etika, *attitude* bagi orang Madura.

Saya tidak ingin nyebut nama, tapi saya sangat kecewa seorang Direktur laganya lebih-lebih dari seorang menteri pada waktu itu. Enggak enak, tapi sebetulnya sudah menjadi bahan evaluasi mungkin di Kementerian Perhubungan, pada waktu itu dipimpin oleh Andi Iwan Aras, sahabat saya, beliau juga mengatakan orang ini memang sombong, padahal kita ini Pak Menteri, kami sebetulnya tidak perlu merengek-rengok kepada pemerintah, karena salah satu variabel bagaimana APBN, kalau urusan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Socah tentunya bukan APBN, skemanya kan KPBU tapi saya berharap dorongan dari Kementerian Perhubungan, dorongan, bahwa Bangkalan Madura secara umum ini sudah tidak menolak investor, tidak menolak investasi.

Kami ada di Indonesia bagian barat, tapi nasib sama dengan Indonesia bagian timur, Pak Menteri. Lagi-lagi saya berharap, karena ini masih dua kali, tiga kali lagi dengan Pak Menteri yang sangat baik ini, saya berharap disisakan waktu ini untuk dijadikan apa dorongan kepada pihak terkait, apakah itu Pelindo, walaupun kepada Bapak Presiden disampaikan, bahwa bagaimana rencana pembangunan Tanjung Bulu Pandan atau minimal pembangunan Pelabuhan Socah, karena saya yakin apabila daerah atau negara yang punya Pelabuhan itu maka tingkat kemajuan ekonominya akan bagus, sehingga nantinya apabila ini tercapai Pak Menteri dan ada investor lagi dari Cina atau dari manapun kita *welcome*.

Saya sudah mendorong pemerintah daerah, pemerintah daerah ini dipegang oleh PJ sekarang, tidak seperti yang kemarin, Pak Menteri. Jadi Pak PJ ini sudah bagus dan infrastruktur-infrastruktur penunjang ke kawasan itu, ini sudah dilakukan. Artinya untuk 2025, kami kemarin ketemu, pelebaran jalan daerah yang menuju ke..., ke titik-titik yang Pelabuhan Socah ini akan dibebaskan oleh pemerintah daerah selaku yang punya kewajiban untuk membebaskan lahan itu. Jadi, Pak Menteri, saya sekali lagi tidak pernah merasa capek untuk menyuarakan ini demi kepentingan masyarakat Madura.

Yang kedua Pak Menteri, karena di Madura Ini sudah walaupun hanya separuh dari volume apa namanya, ruas jalan nasional mulai dari Kamal sampai Sumenep, ini sampai ke Sampang kayaknya masih belum ada marka jalan di Tengah. Saya berharap marka jalan nasional ini segera di apa namanya di..., di..., dipasang Pak Menteri, baik itu rambu ataupun marka jalannya karena ini menyangkut tertib lalu lintaslah. Jadi kalau *ndak* ada yang di tengah itu ini serang-serong begitu orang Madura kan, kalau *ndak* ada, apalagi..., apalagi *ndak* ada itunya, jadi enggak enggak bagus gitu kan. Jadi untuk 202,5 mudah-mudahan untuk marka jalan ini bisa apa namanya dianggarkan di..., di..., di anggaran 2025 ini.

Yang terakhir, Pak Menteri, yang terakhir, kami berharap bahwa, *eh* teman-teman di Kementerian Perhubungan ini untuk walaupun presidennya

mungkin beda namun keberlanjutan itu akan terus. Mudah-mudahan Pak Menteri juga terpilih kembali. Secara pribadi saya apresiasi kepada Pak Menteri, tapi tolong untuk di bawahnya Pak Menteri ya, mohon maaf, sekelas direktur ini jangan sampai berlagak seorang Menteri, orang menterinya aja bagus seperti ini, apalagi direktur, jangan sombong itu, apalagi ini orang Jawa Timur aslinya katanya. Saya malu sebagai orang Jawa Timur berlagak sombong seperti itu.

Terima kasih, Pak Menteri. Mohon maaf, Ketua.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Sesama Jawa Timur lebaran silaturahmi aja, Pak, nanti lebaran didatangi dia, mudah-mudahan pada saat lebaran tidak sombong dia, Pak. Setuju enggak? Pak menterinya oke ya, kalau Pak menterinya oke. Boleh *dong* kita kasih tepuk tangan buat Pak Menteri ya, soal dari tadi begitu dia nyebut sombong mukanya saya lihat tegang semuanya. Iya tegang, Pak.

Ya, sudah tahulah namanya kita, kan namanya Masyhud, apa tadi Masyhud apa, Muhammad Masyhud, S.T., betul enggak? betul enggak atau salah? betul enggak? betul apa enggak? salah nama bahaya kita, salah nama bahaya kita, Pak, namanya Pak..., Pak Masyhud, Pak Menteri, tolong diingatkan, Pak, itu *loh*. Ketua yang mimpin rapat jadi enggak enak, ini misterinya apa lagi ceritanya dibikin, sebut aja, Pak. Iya nanti lebaran haji bentar lagi *nih*, minta maaf ya atau *ndak* beli sapi sama-sama bareng Pak bikin korban, berdamai.

Baik. Pak Syafiuddin dari Jawa Timur Madura, kita ke Papua lagi, Pak Willem Wandik mau ngambil bagiannya? mau? silakan.

F-PD (WILLEM WANDIK, S.SOS.):

Baik, Pak Ketua.

Kami mau sampaikan sedikit di sini.

Pak Menteri, dari kami pertama, kami melihat di sini alokasi anggaran Kementerian Perhubungan 2024 ini sangat jauh dari kebutuhan anggaran. Mungkin Ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menganggap Pak Menteri Perhubungan dianggap sudah mampu mencari dana sendiri untuk membiayai lembaga yang dipimpin. Ya, itu sedikit yang kami melihat seperti itu.

Dan terkait dengan untuk kepentingan tanah Papua, Pak Menteri, kami berharap dilakukan kajian kembali untuk pertimbangan bagi kemungkinan peningkatan status kelas bandara utama di wilayah ibukota kabupaten yang

la

ada di Provinsi Papua baru, di wilayah Papua, agar ke depannya lebih mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi.

Dan yang berikut, itu terus lakukan kajian terhadap bandara-bandara perintis yang ada di Papua, baik di wilayah Papua yang pemekaran baru maupun juga Papua induk. Ya, itu yang bisa dapat kami sampaikan.

Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Pak Willem, terima kasih.

Selanjutnya Bu Novita, biar agak dingin sedikit ruangan, biar kita kasih Ibu Novita dulu.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Penghangat kali *ah*.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota,
Pak Menteri,
Pak Dirjen dan jajaran,

Semoga selalu sehat semuanya *aamiin ya rabbal alamin*.

Pak Menteri, terima kasih atas kerja sama dan program-program yang sudah turun di Dapil saya, tetap harus apresiasi, ada bus, kemudian *oh* belum ya tahun ini, kemarin.

Kemudian Pak Menteri, di sini saya hanya ingin apa namanya menanyakan langkah-langkah kecelakaan-kecelakaan yang kemarin terjadi, Pak Menteri, karena sudah memakan banyak korban. Jadi saya ingin tanya langkah konkretnya apa saja gitu? karena kalau dibahas pasti ada pembahasan, langkah-langkah tapi apa *sih* langkahnya, karena ini penting banget. Kecelakaan-kecelakaan di darat kemarin itu beberapa pariwisata dan bus-bus itu penting sekali menurut saya, momen ini saya tanyakan.

Kemudian ini darat dulu, tentang lampu masih banyak sekali yang daerah-daerah perlu pemasangan lampu di jalur strategis-strategis dan nasional, jadi perlu sekali penambahan lampu jalan, marka, kemudian *guardrail-guardrail* juga di titik-titik yang dibutuhkan Pak Menteri dan Pak Novi.

Berikutnya tentang Dirjen Laut di Pelabuhan, Pak. Ada berita tentang pembangunan pelabuhan di Timika, Pak Menteri, yang kelihatannya itu lahannya ada sengketa dan kebetulan juga yang punya lahan juga sempat ketemu kita, minta untuk bisa disampaikan tentang sengketa itu, karena dari pemerintah kelihatannya akan dibangun. *Nah*, ini saya ingin tahu itu prosesnya bagaimana dan penanganan tentang sengketa tanahnya bagaimana, karena kepemilikan dia itu 600 hektar dan suratnya lengkap, sedangkan beritanya itu akan menjadi pembangunan prioritas. Kali ini saya ingin penjelasan dari kementerian.

Kemudian kalau di Cilacap pelabuhannya mungkin masih PR ya, Pak ya, karena waktu itu kita minta ada pengerukan gitu. Saya enggak ngerti, katanya masih-masih moratorium gitu di Cilacap, karena banyak kapal besar ingin sandar enggak bisa di situ apa termasuk dangkal.

Kemudian untuk kereta api, kereta api *sih* sudah cukup memuaskan, karena banyak sekali masyarakat menggunakan kereta api. Hanya PR-nya sekali lagi bertahun-tahun tentang kecelakaan yang ada di rel kereta api itu palang pintu yang sejajar dengan jalan maupun jalur-jalur yang liar. *Nah*, ini PR banget bagaimana langkah-langkah konkretnya, karena enggak bisa dibiarin juga. Udah periode lalu kita mendengarkan akan ada koordinasi antara pusat, provinsi, kabupaten dan sebagainya, tetapi apakah ini sudah dilakukan *real*-nya gitu.

Tentang Whoosh tadi teman-teman sudah tanyakan, kemudian udara mau tanya bagaimana pembangunan bandara di Bali yang baru, gitu, mungkin ada Bu Kristi ya di sini, apakah berlanjut pembangunan bandara di Bali?

Kemudian PR tentang bandara yang Kualanamu yang dikuasai oleh orang India, Pak. Itu PR banget juga itu keluhannya banyak benar di sana. Ini orang India datang ke Indonesia kemudian menguasai dan semena-mena. Saya minta sekali, Pak, di Kualanamu itu ada tindakan-tindakan konkret *tuh*, jangan sampai orang luar negeri, orang India lagi apa namanya menguasai di sana dan menindas masyarakat Indonesia. Itu, Pimpinan.

Terima kasih Pak Menteri dan jajaran.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Waalaiikumsalam.

Pak Menteri, pertama saya didatangi oleh Pak Syafiuddin, permintaan maaf kepada Pak Masyhud, karena ini nyangkut nama orang, yang dimaksud bukan Pak Masyhud, Pak, tapi Pak Bagio, itu ada pakai masker. Ya, Pak Bagio, nanti *case*-nya apa nanti tolong dibicarakan, salaman, entar lebaran haji salaman dia ya. Pak Bagio, tolong kalau ada Anggota yang hubungi, layani, kalau ngajak yang aneh-aneh Bapak tolak, tapi dalam konteks pekerjaan

la

koordinasi dan seterusnya saya rasa kita diatur, namanya juga mitra. Bagaimana berkoordinasi kalau enggak bisa bicara, kasihan nanti menterinya. Perbuatan bawah nanti di rapat menterinya yang diserang di sini, karena ini nyangkut nama orang, sekali lagi Pak Syafiuddin tadi sampai ke sini menyampaikan permohonan maaf atas nama Pak Masyhud, yang dimaksud adalah Pak Bagio.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Yang mana *sih*, Pak Bagio?

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Itu Pak Bagio yang pakai masker.

F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Jadi *kepo* saya, *oh*.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tolong Pak Bagio kalau ada hal-hal yang teman-teman kontak dalam konteks urusan Dapil dan seterusnya yang tidak melanggar hukum, saya garis bawah yang tidak melanggar hukum, kita harus koordinasi *dong*, bagaimana kita mitra kalau komunikasi aja enggak bisa ya, komunikasi terkait pembangunan daerah dan seterusnya, masa seluruh Anggota ini semua ngomong ke menteri semua, untuk apa ada bawahan? Itu *dong*, ya hal-hal kecil itu atau terkait dengan hal teknis pastilah direktorat itu jauh lebih tahu daripada Pak Menteri, ya kan? Kita tanya Pak Menteri, pun Pak Menteri nanti tanya dulu direktornya, saya tanya dulu direktornya. Direktur tanya lagi kepala bagiannya dan seterusnya, saya *ndak* perlu ajarilah pola komunikasi ini.

Maksud saya, saya sebagai Ketua Komisi tidak nyaman kalau ada Anggota yang ngomong seperti ini di ruangan ini, Pak, enggak enak saya, itu menunjukkan bahwa kita tidak mitra yang baik. Oleh karenanya, di ujung masa jabatan ini, kita sisakanlah untuk kita saling berdamai, sehingga nanti istilah saya dengan Pak BKS ini kita masing-masing *soft landing*, Pak, *nah*, *soft landing*.

Kalau Pak Menteri nanti jadi Menteri Perhubungan lagi, puji Tuhan, *alhamdulillah*, *aamiin*, tambah, kita sudah kenal lama beliau ini 10 tahun kan, tapi walaupun tidak ya tentu kita berharap Eselon I, Eselon II yang masih menjabat. Ini kan siapapun presidennya ya pejabat di Kementerian Perhubungan strukturalnya tetap itu kan, ini-inilah orangnya, saya rasa ini penting. Tidak untuk membesar-besarkan, tetapi saya berharap komunikasi yang baik tidak memunculkan suara-suara seperti yang tadi Pak Syafiuddin sampaikan di ruangan rapat, karena kalau demikian, saya sebagai Ketua ini

termasuk gagal menjaga komunikasi antara Komisi V dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan.

Kemudian habis Ibu Novita, ya memang saya sedikit ini yang Cilacap ini Pak Menteri, di Cilacap ini kita sama-sama tahu ini ada Pertamina gede di sana kan, itu ini juga perlu mendapat perhatian ketimbang kita membangun pelabuhan baru yang tidak *profitable* dan seterusnya, karena kita juga belum selesai menginventarisir berapa banyak pelabuhan warisan masa lalu yang kita belum bisa selesaikan, terutama jalan akses dan seterusnya, sementara yang membutuhkan belum kita sentuh.

Kemudian yang berikutnya, setelah Bu Novita, kita ke Sulawesi Tengah.

Pak Anwar Hafid dipersilakan.

F-PD (ANWAR HAFID):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi menjelang siang,
Salam sejahtera buat kita sekalian.

Yang saya hormati para Pimpinan,
Para Anggota Komisi V,
Pak Menteri dan seluruh jajarannya.

Pertama-tama, saya mewakili masyarakat Sulawesi Tengah, Pak Menteri, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Perhubungan yang telah banyak berikan sumbangsih pembangunan di Sulawesi Tengah dan kemarin Pak Menteri, Pak Presiden sudah banyak meresmikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah.

Yang kedua, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu, masih ada satu, Pak Menteri, pekerjaannya Pak Menteri ini, aspirasi masyarakat Kabupaten Donggala, Pak Menteri, sehubungan dengan peresmian Pelabuhan Donggala yang kemarin tidak sempat diresmikan oleh Bapak Presiden. Masyarakat Kabupaten Donggala sangat berharap untuk segera difungsikan pelabuhan itu karena tentu ini sangat memberi dampak ekonomi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala.

Kalau kemarin Pelabuhan Pantoloan sudah diresmikan, masyarakat beberapa kali saya turun di daerah, di Kabupaten Donggala, mereka sangat berharap Pak Menteri dalam waktu yang tidak lama untuk segera difungsikan, karena memang ada pengalaman Sejarah, Pak Menteri. Dulu kegiatan kepelabuhanan itu di Kabupaten Donggala, kemudian berpindah ke Kota Palu dan masyarakat sangat mengapresiasi dengan adanya kembali pembangunan pelabuhan yang ada di Kabupaten Donggala.

Oleh karena itu, sekali lagi menyampaikan aspirasi masyarakat, mohon perkenan Pak Menteri kalau sudah semua rampung untuk segera difungsikan,

sehingga ini tentu akan menambah lagi *multiplier effect* ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala sekitarnya tentunya.

Nah, yang kedua Pak Menteri, ini sebetulnya bukan kita paham, saya sangat paham bahwa ini adalah kewenangan penuh Pak Menteri dalam hal penataan birokrasi yang ada di daerah, namun mungkin sebab dalam kaitan dengan hubungan kemitraan, saya kemarin agak kaget saja, ketika saya tahu Kepala Balai Perhubungan Darat sudah diganti, padahal menurut saya selama ini koordinasinya Pak Kepala Balai itu sangat bagus dengan kita di Komisi V khususnya. Ya, mudah-mudahan ke depan kalau ada yang begitu minimal juga ditanya-tanya kita, Pak, *oh* gimana ini Pak Anwar kepala balainya di sana bagus *ndak* kerja samanya, gitu ya, karena sangat bagus menurut saya, Pak, program kita lancar dan setiap saat koordinasinya sangat bagus, tapi kaget saja *sih* tiba-tiba pindah. Mungkin mudah-mudahan promosinya lebih bagus lagi, Pak Menteri.

Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wallahul musta'an,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Anwar Hafid.

Dari Sulawesi Tengah kita ke Kalimantan Timur, silakan Adinda Irwan.

F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua Komisi V DPR RI,
Pimpinan Komisi V, serta
Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,
Yang saya hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
Pak Dirjen,
Pak Sekjen, dan
Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang saya cintai dan banggakan,

Tentu seperti kawan-kawan yang lain saya juga mengapresiasi ya, kalau Pak Menteri juga Oktober, sama, saya juga *Insya Allah* berakhir di Oktober ini, tetapi ada beberapa mungkin poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini terkait fokus Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam kerangka

la

pembangunan transportasi 5 tahun ke depan ya dari 2025 sampai 2029 seperti yang dipaparkan.

Ini sangat bagus ya, kerangkanya saya melihat bagaimana Kemenhub nanti fokus pada infrastruktur dasar ya terkait peningkatan kualitas jalan, transportasi, multimoda dan keselamatan transportasi, tapi sisi lain juga akan fokus pada infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti konektivitas terhadap pelabuhan utama, bandara, kemudian jalan tol, serta kereta api, nah termasuk juga di sektor ekonomi.

Tetapi saya lihat dari kebutuhan pagu indikatif masih ada kekurangan 15 triliun ya, ya 15 triliun lebih, kekurangan terhadap rencana kegiatan prioritas ini yang dalam-dalam kerangka pembangunan transportasi 2025-2029. Mungkin nanti bisa disampaikan, Pak Menteri, gimana ini, sementara menurut saya *sih* ini harus dituntas kan ya. Lima tahun ke depan kalau ini tuntas saya pikir pondasi kita menuju Indonesia emas 2045 bisa tercapai gitu, bisa *solid*, tetapi kalau kemudian kekurangan indikatif 15 triliun ini, Pimpinan, Pak Ketua Komisi V, ini enggak dibantu, menurut saya *sih* akan sama ya ritmenya dengan 5 tahun sebelumnya, selalu ada *backlog* anggaran di Kementerian Perhubungan.

Menurut saya *sih* ini harus menjadi PR kita bersama ya, termasuk kawan-kawan Komisi V bagaimana bisa kemudian mendorong kekurangan pagu ini untuk kegiatan prioritas 5 tahun ke depan bisa kemudian ada solusinya.

Kemudian yang kedua, Pak Menteri. Kemarin Pak Menteri ke IKN, *Insya Allah* 1 Agustus 2024 bandara VIP kita fungsional. Saya cuma pengen tahu progres pembangunannya sudah sampai mana, Pak? Berapa persen yang belum tergarap dan secara apa namanya psikologisnya, saya mau tanya ini pekerjaannya normal atau terburu-buru *nih*, Pak Menteri? karena ini kan bicara mengenai *quality control* kan, kalau terburu-buru nanti kualitasnya gimana, tapi kalau memang 1 Agus itu fungsional *dapi* dalam kondisi pekerjaannya normal saya pikir kita semua yakin kualitasnya terkait keamanan dan keselamatan saat digunakan perayaan HUT Kemerdekaan nanti, para pemimpin-pemimpin kita menggunakan itu *Insya Allah* semuanya selamat dan aman.

Tadi terkait fokus ini juga, apa namanya konektivitas ya, terutama jaringan pelabuhan. Terima kasih, Pak Menteri, selama 3 tahun ini kita fokus membangun, kebetulan di daerah kelahiran saya, Sangkulirang itu kita bangun dermaga ferry penyeberangan, itu nanti sekaligus menghubungkan ya kecamatan di kabupaten ini. Tetapi berdasarkan diskusi ya dengan teman-teman BPTD di Kaltim, dengan Dirjen Perhubungan Darat juga, *Insya Allah* dermaga ferry penyeberangan ini *Insya Allah* ke depan bisa malah antar provinsi ya, dari Kaltim misalnya ke Sulteng, bisa ke Sulawesi Selatan.

Nah, saya minta bantu, Pak, karena sebenarnya pekerjaan Kemenhub sudah selesai, Pak, 100%, dermaga ferry-nya bagus, kalau bisa diresmikan Pak Menteri sangat layaklah itu diresmikan dari sisi anggaran dan kualitas, tetapi ada masalah dengan akses jalannya, Pak, ada 4 kilometer itu yang belum

ada konstruksi jalannya, baru tanah. Itu sebenarnya kita sudah usulkan melalui Inpres jalan daerah, tetapi kalau ada surat dari Pak Menteri terkait konektivitas dari jalan ke pelabuhan ke dermaga ferry-nya itu, saya pikir sangat menguatkan, Pak, apalagi Pak Menteri PUPR kemarin juga rasanya sudah komunikasi dengan Pak Menteri.

Saya hanya mengingatkan kembali agar Pak Menteri bisa menyuratin Kementerian PUPR agar tahun ini bisa diprioritaskan dalam tahap dua untuk Inpres jalan daerah. Kalau itu dilaksanakan *Insya Allah* akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur maupun Kaltim *Insya Allah* bisa apa namanya, ada dampaknya lah daripada dengan adanya dermaga ini.

Kemudian yang terakhir Pimpinan, enggak apa-apa kan lama-lama Pimpinan, ya kan?

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Dipersilakan Adinda.

F-PD (DR.H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Nanti teman-teman juga akan merindukan suara saya.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Boleh-boleh, pokoknya sampai Adinda puaslah, silakan kita tunggu.

F-PD (DR.H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Kementerian Perhubungan ini menurut saya *sih* kita harus kasih *applause* dulu, Pimpinan. Selama 4 tahun ini ya bandara kami, kemudian pelabuhan kami, dermaga, terminal kami ya, kelengkapan dan keselamatan jalan semuanya, semuanya *alhamdulillah* progresif.

Nah, cuma saya ada PR, Pak. Saya lahir di Sangkulirang di Kutai Timur sebuah kabupaten yang luasnya 31.240 kilometer persegi, 3,5 juta hektar, Pak, lebih luas daripada Jawa Barat dan Banten digabung ya, kontribusinya juga terhadap Republik ini enggak main-main, tambang batu bara terbesar di Asia Tenggara itu ada di Kutai Timur, tetapi enggak punya bandara penghubung, Pak. Sementara Berau di sampingnya *tuh* sudah ada bandara Kalimantan, Samarinda sudah ada bandara.

Nah, tetapi menurut saya *sih* potensi ke depan baik terkait potensial penumpang maupun kemudian membuka apa namanya terkait isolasi, karena ada 18 kecamatan kemudian bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur ini harus ada bandara, Pak. Enggak ada yang mau datang di Kutai Timur ini terkait wisatanya yang sangat potensial, kemudian sekarang perkebunannya, pertambangan itu semua udah ke hilir, Pak, pabrik-pabrik

perkebunan sudah terbangun semua, semua ke hilir, tapi kalau enggak punya bandara yang apa namanya, bisa *direct* langsung misalnya ke provinsi lain, minimal ke Jakarta, ini kabupaten enggak akan pernah bisa apa namanya, tinggal landas, Pak, padahal luar biasa kontribusinya Kutai Timur ini.

Saya berharap Kementerian Perhubungan ini bisa kemudian, nanti kami dorong, Pak, pemerintah daerahnya agar bisa mengusulkan satu lokasi, sementara sebenarnya potensinya ada tiga di sana, ada bandara perintis ya Uyang Lahai di Kecamatan Kongbeng itu *existing*, Pak, tapi saat ini dipergunakan mungkin ya sebulan sekali karena apa? *runway*-nya itu masih tanah, masih pendek, padahal lahannya sangat luas.

Kemudian ada Bandara Sangkima, udah enggak kepakai eks Pertamina dulu, bandara Pertamina di Sangatta Selatan. Kemudian ada Bandara Tanjung Bara, bandara *private* PT Kaltim Primako. Ya, dari tiga ini sebenarnya kalau mau kita kembangkan seperti Bandara Kalimantan atau misalnya Bandara APT Pranoto ini sangat bisa, Pak. Harapan saya ada satu bandara penghubung di Kutai Timur ini dan ini saya yakin kalau bisa terwujud ini sangat bermanfaat baik Kaltimnya maupun sebagai daerah pendukung IKN nantinya.

Mungkin itu aja harapan saya, Pak, kalau ini bisa terwujud saya ini bisa tidur tenang ini, Ketua. Ya, APBD-nya juga 9 sampai 11 triliun, Pak. Jadi kalau mau KPBU ataupun misalnya buat sendiri, kalau nanti bupati terpilihnya bisa prioritaskan ke sana ini bisa terbangun.

Mungkin itu Pimpinan, yang saya sampaikan, ya saya juga takutnya enggak sempat ini jadi saya kalau ada salah selama ini juga mohon maaf, ya tentu di dalam penyampaian kita memperjuangkan daerah kita ini kan kadang-kadang keselip kata atau saking bersemangatnya, saya ingin semuanya berakhir dengan baik, tapi Pak Bagio sama saya baik *kok* ya, mungkin ya namanya manusia ya Pak Syaifuddin ya, tapi momen lebaran Idul Adha ini baiknya kita semua saling memaafkan.

Kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wabillahi taufik walhidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih.

Saya mendengar Adinda ini mau nangis saya, terharu saya, terharu saya. Ga apa-apa Adinda, nanti mana tahu kan oleh Demokrat diusulkan jadi Menteri Perhubungan gitu, iya enggak, gimana setuju enggak teman-teman? Waduh kalau Irwan duduk di sana jadi Menteri, saya pasti berjuang jadi Ketua Komisi V lagi, Pak, di sini ya.

Terima kasih, Pak Irwan.

Ya, kalau soal bandara mungkin nanti dibicarakan kembali dengan Dirjen Udara, dengan Pak Menteri. Biasanya kan kalau bandara ini kalau saya tidak salah dia ada hitungan jarak dari bandara terdekat, itu biasanya. *Nah*, jadi bandara terdekat dari wilayah Dinda ini jarak tempuhnya berapa jauh, berapa-berapa jam? 3-4 jam itu masih, jalan darat ya, jalan darat 3-4 jam, 3-4 jam itu masih dekat, termasuk dekat itu dinda 3 - 4 jam. Ya, mungkin karena ini daerah kaya ya, tinggal mungkin Penloknya saja dan izin boleh membangun bandara pakai APBD, ini salah satu jalan keluarnya, saya rasa demikian. Terima kasih Dinda Irwan.

Kemudian berikutnya dari Kalimantan Barat, Timur ke Kalimantan Barat, Pak Boyman Harun dipersilakan, bersiap-siap nanti Pak Fadholi.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Pak, sudah banyak sekali kerjasama kita di 5 tahun ini yang sudah Bapak laksanakan dalam rangka membantu masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi Masyarakat. Cuman di penghujung ini dalam rangka penyusunan rencana kerja atau rencana anggaran 2020..., 2025, saya hanya ingin mengingatkan agar pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah kita laksanakan ini pemanfaatannya benar-benar maksimal. Sebagai contoh misalkan Pelabuhan Kendawangan itu sudah dibangun bahkan sudah dianggap selesai sampai 2035, artinya sudah maksimal, tetapi menurut saya pemanfaatannya yang kurang maksimal, Pak.

Pertama, dari segi pemanfaatan keluar masuknya kapal yang ada itu paling hanya kapal-kapal barang. Sebenarnya dulu itu adanya ferry, Pak, antara Kendawangan–Semarang, sekarang sudah tidak ada. Jadi, menurut saya alangkah ruginya kalau pelabuhan sebagus itu tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal dan *alhamdulillah*, Pak, untuk akses jalan semoga di 2025 ini selesai, itu akan dibangun yang mana setelah dibantu dengan dana Inpres oleh PUPR. Jadi kalau jalan aksesnya itu sudah bagus, saya yakin alternatif orang naik pesawat itu dari Ketapang ke Semarang itu ada-ada kapal, ada kapal.

Dulu waktu ada kapal orang lebih baik naik kapal Cisadane dulu namanya ke Semarang itu daripada naik pesawat dan biayanya lebih murah. Jadi, harapan saya agar dimaksimalkan, dimasukkan kapal ferry dalam rangka untuk mempercepat arus barang. Karena di Kabupaten Ketapang itu, Pak, kalau kita mau hitung itu kalau kebun sawitnya itu hampir 1 juta hektar, Pak, belum lagi berdiri perusahaan Alumina WHW itu dan pelabuhan yang representatif *ndak* ada, Pak, jadi kabupaten/kota yang tidak ada pelabuhan itu cuman Ketapang, kalau Kendawangan itu kan di kecamatannya. Makanya saya minta juga kepada Pak Menteri dalam penganggaran ke depan 2025, tolong

pelabuhan laut di Kabupaten Ketapang itu di kotanya itu agar dipikirkan untuk dibangun.

Kemudian, Pak, saya lagi-lagi mengingatkan pembangunan Pelabuhan Bangka Belitung–Ketapang, itu disebutnya Pelabuhan Bangka Belitung, Pak, karena itu hanya rutanya Bangka Belitung dan Ketapang, itu sampai sekarang mangkrak, Pak, tidak dipergunakan. Sering saya ingatkan ini, bahkan menurut syahbandar itu alurnya salah, Pak. Jadi kalau memang alurnya tidak, alurnya salah dan pelabuhan itu tidak bisa digunakan, lebih baik dicabut Kembali, Pak, daripada mengganggu alurnya itu. Jadi pemanfaatan itu saya pikir sangat rugi kalau kita tidak gunakan.

Bahkan kemarin saya sudah pernah ajukan, Pak, bagaimana Pelabuhan Bangka Belitung itu yang seharusnya menjadi domainnya bagian darat, kita jadikan pelabuhan laut, Pak, kita jadikan pelabuhan laut, tetapi barangkali mau ditinjau ulang berkaitan dengan penetapan alurnya itu agar jangan salah. Jadi, itu harapan saya di 2025.

Untuk bandara, Pak, *alhamdulillah*, Pak, baik *runway* maupun terminalnya sudah dibangun tinggal menunggu pemenangnya, cuman sayang, Pak, kita doakan semoga cepat sembuh. Beliau itu Kepala Bandara Ketapang itu sakit sekarang, Pak, baru-baru ini sakit, kita doakan semoga beliau, Pak Amran segera sembuh dan bisa beraktivitas lagi sebagai Kepala Bandara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saya pikir itu, Ketua.

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

la

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Boy.

Dari Kalimantan Barat kita ke....

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Interupsi, boleh Ketua sebentar, ada yang ketinggalan, *ndak* ini-ini penting Ketua, saya pikir mungkin Ketua pun lupa ini sebenarnya.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak Boy.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Boleh, ya?

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Tapi ada syarat ya, tapi nanti ketemu setelah kita selesai ya.
Silakan.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Saya, Pak...Pak Menteri, hanya ingin pada hari ini Bapak jawab di sini berkaitan dengan penutupan Bandar Udara Kalimantan Barat, Pontianak, rute internasionalnya itu, karena saya, Pak Lasarus dan Pak Syarif Abdullah seperti tidak ada kemampuan untuk menjelaskan kepada masyarakat kami, Pak.

Jujur saja bandaranya baik, *runway*-nya baik, pesawatnya ada, penumpangnya banyak, tapi kenapa ditutup rute internasional kami. Jadi Bapak tolong bantu kami agar dijawab, sehingga kami untuk menjelaskan kepada masyarakat juga enak, Pak. Barangkali kita sama-sama ada keterbatasanlah barangkali. Bapak ada keterbatasan, kami pun ada keterbatasan, tetapi dengan adanya jawaban Bapak paling tidak bisa meringankan beban kami dan membuat masyarakat Kalimantan Barat juga jelas dengan teka-teki yang ada ini, Pak.

Saya pikir itu cukup, Pak Ketua.
Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Boy.

Untuk yang interupsi ini, Pak Menteri, memang seperti saya pernah ngomong di rapat beberapa waktu yang lalu sampai saya mohon maaf menjawab Pak Menteri agak ketus, waktu itu.

Saya, kami kunjungan kerja ke Kalimantan Barat waktu itu ke Kapuas Hulu, Pak, kunker komisi. Saya ditemani beberapa Anggota DPR dari Pontianak, kami terbang ke Kapuas Hulu, nyampai di Putussibau ada dari beberapa *airline*, Pak, Citilink kemudian grupnya Lion Group ya, ada Lion Group, kan ada beberapa ini maskapainya di Lion Group ini, termasuk Garuda itu menemui kami, Pak, minta supaya kami bicara dengan Kementerian Perhubungan untuk dibuka kembali penerbangan internasional dari Pontianak ke rute-rute yang selama ini sebelum covid dulu dijalani.

Kemudian yang menjadi pertanyaan seperti Pak Boy sulit jelaskan dan saya yakin juga ini di provinsi lain terjadi hal yang sama yang internasionalnya ditutup. Ini maskapainya mohon-mohon, berarti kan ini dari sisi maskapai menguntungkan, Pak. Kemudian kebutuhan masyarakat pasti iya. Sekarang karena kebijakan pemerintah semua harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru bisa terbang keluar. Saya rasa bandara dibangun dalam konteks mensejahterakan Masyarakat, Pak, mensejahterakan rakyat, itu dulu yang utama. *Nah*, sekarang menurut saya dalam konteks mensejahterakan masyarakat atau rakyat ini, ini tidak dapat kita capai dengan kebijakan penutupan ini.

Sekarang masyarakat harus mengorbankan uang lebih banyak dengan terbang ke Jakarta dulu, satu. Yang kedua, membuang waktu lebih banyak dengan harus ke Jakarta dulu pasti nyampai di sini transit, Pak, baru bisa terbang ke negara yang dituju, padahal maskapainya mohon, pasti *demand*-nya ada, permintaannya ada.

Ini memang sulit kami jelaskan, Pak Menteri ya, waktu itu Pak Menteri, teman-teman sekalian ya, ini Pak Menteri dulu jawab, saya masih ingat bahwa ini kebijakan Menkominfo, tidak berada pada kewenangan Pak Menteri Perhubungan. Ini menjadi rumit, kami bukan mitranya Menkominfo, mau bertanya sama Pak Menkominfo enggak punya forum kita, sementara kami wakil rakyat harus menjelaskan ini kepada rakyat, kepada Masyarakat, *gitu loh*, Pak.

Jadi, daerah sebesar Kalimantan Barat, Pak, Kalimantan Barat ini luasnya satu sepertiga Pulau Jawa, Pak, dan investasi di Kalimantan Barat tidak perlu saya jelaskan. Pak Menkominfo pasti sudah tahu ada berapa banyak perusahaan besar di sana yang juga mungkin sebagian sahamnya milik orang dari luar, mereka juga punya kepentingan untuk bisa terbang *direct* ke Kalimantan Barat.

Jadi, dari berbagai sisi sulit kami menjelaskan ini kepada masyarakat kenapa ini ditutup, dalam konteks kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat

ya. Saya rasa kita ini ada di sini, negara ini membangun, pasti menempatkan rakyat pada posisi pertama. Kita ini kan melayani rakyat semua ini. Judulnya, apakah kebijakan ini untuk kepentingan rakyat atau tidak, rakyat merasa kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat, Pak, tidak berpihak kepada masyarakat. *Nah*, itulah yang sulit dijelaskan seperti kata Pak Boy tadi, bukan hanya di Kalimantan Barat. Saya rasa bandara lain yang punya penerbangan rutin ya *demand*-nya tinggi pasti semua berhadapan dengan persoalan yang yang sama.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, pasti ini mendorong pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi di daerah. Ada surat gubernur melalui kami langsung kepada Pak Menteri dan seterusnya, berarti ada terasa dampaknya terhadap kemajuan daerah ketika internasional ini ditutup.

Saya rasa ini nanti perlu Pak Menteri jelaskan ya terkhusus hal ini, karena ini bukan hanya untuk kita Kalbar, Pak Boy ya, dan untuk tempat-tempat lain. Seharusnya, hitungan kita kan sebetulnya kalau untuk bandara ini negara membangun, kita bangun bandara *nih*, setelah bandara ini kita bangun yang tidak *profitable* itu biasanya kita diolah oleh pemerintah dulu ya dengan ditangani oleh langsung Kementerian Perhubungan, tetapi bandara-bandara yang prospeknya bagus nanti diambil alih oleh swasta dalam hal ini kita punya Angkasa Pura ya.

Jadi, ini sebetulnya dibangun untuk melayani kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, menjelaskan ini bahwa ini berpihak kepada rakyat atau tidak keputusan ini, ini yang sulit kami jelaskan seperti yang tadi Pak Boy sampaikan dengan kebijakan ini, saya rasa itu. Yang lain nanti kalau punya bandaranya internasionalnya ditutup tidak perlu lagi menyampaikan, saya rasa ulasan saya sudah cukup mewakili.

Kemudian berikutnya dari Pak Fadholi dari Dapil Jawa Tengah ya, ya Dapil Jawa Tengah.

Saya persilakan, Pak Fadholi.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI, M.I.KOM.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan Komisi, dan
Bapak-Ibu Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri, dan
Seluruh jajarannya yang saya hormati,

Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi atas kinerja Pak Menteri yang selama ini, mudah-mudahan semua kerja-kerja itu bisa membuahkan *husnul khatimah, aamiin allahuma aamiin*.

Dan yang kedua, memahami suasana kebatinan Pak Menteri dalam rangka untuk bisa menjabarkan terkait masalah anggaran dan kemudian

realisasi, kami paham sekali. Jadi kalau pagu kebutuhan itu sudah tercukupi, saya pikir Pak Menteri itu senyumnya agak lebar kan ini, karena ini kan masih ada dalam satu pagu indikatifnya aja masih lebih kecil daripada alokasi anggaran di tahun 2024, jadi ini memang. *Nah*, untuk itu Pak Menteri, perlu ada satu rumusan skala prioritas yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi tentunya, maka beberapa hal yang perlu saya tanyakan adalah skala prioritas mana yang nantinya akan dititikberatkan oleh Pak Menteri untuk bisa membuat alokasi anggaran tahun 2025, ini menjadi satu bagian yang penting.

Kemudian juga ya kalau kemudian sudah di-*breakdown* kalau saya lihat di sini, ini kan ada beberapa Dirjen yang memang menjadi kalau saya lihat anggarannya besar, berarti kan kebutuhannya besar itu kan bagian dari skala prioritas. *Nah*, nampaknya saya kalau tidak keberatan ini, misalkan di Dirjen Perhubungan Laut misalkan ini ya, perlu ada satu informasi dan ini perlu dibedah, Pak, kaitannya dengan semua pelabuhan seluruh Indonesia.

Jadi, saya ini karena kita juga berbicara secara keseluruhan Indonesia ini, skala prioritasnya pelabuhan ini yang mana yang memang itu betul-betul bisa menumbuhkan perekonomian. Kalau kita melihat secara apa namanya, kebutuhan lokal, memang saya yakin semuanya butuh, Pak itu, semuanya sangat membutuhkan, tetapi ini perlu ada satu *reason*, ada satu alasan yang nanti disampaikan oleh Pak Menteri dan juga menjadi satu *exercise*, bahwa skala prioritas pelabuhan yang memang akan dioptimalkan dan kemudian juga akan didukung dengan anggaran yang cukup besar, ini saya pikir itu perlu disampaikan secara terbuka dan alasannya apa, bagaimana, biar nanti ini menjadi satu kesepakatan.

Karena kalau itu dilakukan, saya pikir ini akan menjadi satu kesamaan visi. Karena kalau ya kalau saya tentu akan memperjuangkan Dapil saya, tetapi memahami bahwa Indonesia ini kan bagian dari secara keseluruhan seluruh provinsi, sehingga tolong ini dijabarkan. *Nah*, ini kan kita, saya belum melihat satu penjabaran terkait skala prioritas daripada masing-masing pelabuhan dan urgensinya. Ini tentu semua saya yakin itu akan berbasis untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Dan yang kedua juga kaitannya dengan masalah optimalisasi di bandara, Pak. Sebetulnya dari seluruh bandara yang ada secara di Indonesia ini, mana bandara yang memang betul-betul rugi dan memang mana yang selalu di apa namanya perlu ada satu subsidi untuk pengelolaannya. Karena saya memahami bahwa untuk bisa mengoptimalkan bandara itu kan variasinya banyak sekali, yang pertama tentu kesiapan dari maskapai karena maskapai itu kalau rugi kan juga tidak akan pernah mau dia untuk bisa melakukan itu dan yang kedua juga fasilitas pendukung lainnya.

Misalkan salah satu karena yang saya dekat ini misalkan di Bandara Kulon Progo yang merupakan satu bandara internasional itu sudah ada keretanya, tetapi di jalur daratnya itu kan memang sangat *crowded* sekali, sehingga orang kalau mau ke sana ini kalau pertimbangannya sudah bandarannya jauh dari pusat kotanya, kemudian jaraknya lama, ini menjadi satu pertimbangan yang ini.

h

Nah, skala prioritas pada daerah-daerah yang memang itu perlu pertumbuhan dan ini menjadi satu daerah-daerah tujuan destinasi secara internasional, saya pikir itu menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh Bapak. Saya pikir itu.

Kemudian juga pada BPSDM, Pak. BPSDM ini saya pikir juga menjadi bagian yang sangat penting, karena di situ nanti ada satu pendidikan. *Nah*, sejauhmana *output* pendidikan yang ada ini. Kemudian jangan sampai lagi iklim daripada pendidikan itu dibikin iklim yang bagus lahan itu, jangan sampai ada kesan kekerasan dan sebagainya di BPSDM itu untuk bisa dididik yang lebih bagus. *Nah*, BPSDM ini mungkin saya sepakat bahwa itu menjadi bagian, karena itu untuk bisa mencetak generasi kita di tahun yang akan datang untuk mempersiapkan tenaga kerja. Saya memberikan apresiasi, termasuk juga di seluruh BPSDM yang memang punya potensi yang memang BPSDM-nya di pendidikan ini yang memang itu perlu ditingkatkan dan sekarang masih lama tapi potensinya bagus, saya pikir itu perlu ditingkatkan, Pak, jadi itu.

Nah, berikutnya, nah itu terkait masalah anggaran di tahun 2025. Rasanya mungkin ini juga perlu ada satu pendalaman melalui FGD, Pak. Jadi mungkin perlu FGD Bapak-Bapak untuk bisa membuat FGD kasus per kasus, misalkan kita bicarakan khusus malah masalah pelabuhan misalkan, atau Dirjen Laut ya, kita FGD khusus untuk Dirjen Laut dan lain sebagainya. Saya pikir ini bagian yang secara makro untuk bisa kita, kalau kita sudah kita bahas di FGD, saya pikir kan sudah tidak ada lagi usulan-usulan parsial yang nanti ini juga saya yakin Pak Menteri akan tidak terlalu bingunglah kan itu.

Nah, berikutnya saya sampaikan juga di perkeretaapian, saya tempo dulu sudah menyampaikan terkait pembangunan rel kereta api di wilayah saya di kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang itu, Pak, yang sampai sekarang, dulu pernah saya bahas di rapat RDP semacam ini dan dua kali sudah saya usulkan dan ini yang ketiga kali saya usulkan, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dan belum ada tindak lanjut untuk bisa di, saya minta untuk dicek aja dari perkeretaapian juga belum ngecek.

Nah, sekarang rel kereta yang sudah di investasi yang cukup besar itu, sekarang di rel kereta apinya itu sudah tumbuh jagung, Pak, jadi sudah ditanami jagung oleh masyarakat. Ini kan sayang ketika kemudian ada *set plan*, ada satu pembangunan yang kemudian tidak *tutup*, tidak sampai, berhenti di tengah jalan, kemudian sekarang tidak ada fungsinya. Kalau tidak ada fungsi kan pembangunan yang sudah kita buat itu mangkrak kan rusak, Pak. Ya, itu tolong nanti untuk bisa mungkin kalau masih memungkinkan dan itu saya yakin karena itu sudah melalui studi kelayakan dan sebagainya untuk membuat itu, ya tentunya tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan masalah pembangunan itu.

Jadi, itu Bapak Menteri yang saya hormati beberapa hal yang saya sampaikan dan apabila ada hal yang tidak berkenan pada Pak Menteri dan seluruh jajarannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin bahwa, saya yakin bahwa apa yang menjadi program-program Bapak itu tentu sudah ada koordinasi kepada Presiden yang akan datang. Jadi enggak usah

saya tanya, saya sudah yakin bahwa itu sudah ada koordinasi dengan Presiden yang akan datang. Saya pikir itu.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Fadholi.

Selanjutnya Pak, dari Jawa Tengah kita ke apa namanya, Sumatera Selatan, Pak Eddy Santana.

F-GERINDRA (IR. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi V yang saya hormati beserta teman-teman Anggota, Menteri Perhubungan yang sama saya hormati beserta seluruh jajaran,

Pertama, Pak, saya ingin kilas balik seminar minggu lalu, Pak, yang diprakarsai oleh Fraksi Gerindra, Pak Menteri datang. Artinya di situ beberapa ahli transportasi berbicara gitu ya, yang paling efektif, gitu ya, untuk tol laut, supaya berjalan dengan baik, efektif dan efisien, itu adalah Kapal Roro, termasuk angkutan logistik. Tentu saya menginginkan, gitu ya, mengharapkan ada suatu *grand design* rencana induk sistem transportasi logistik dari Kementerian Perhubungan untuk Indonesia ini, ya.

Kita punya, Pak, termasuk juga integrasi multimoda kita punya *highway* sekarang, Trans Sumatera *Highway*, nanti katakanlah itu jadi tol Trans Sumatera Highway. Trans Jawa hampir selesailah, Trans Jawa. Semua provinsi ada pelabuhan, di Sumatera mulai dari Aceh, Malahayati, Sumatera Utara, Belawan, kemudian di Riau, Kepri, Kepulauan Riau, ada Batam dan sebagainya, Jambi turun ke bawah ada Kuala Tungkal, Sumatera Selatan ada rencana baru rencana itu, Tanjung Carat, Lampung. *Nah*, tentu semua provinsi ada pelabuhan-pelabuhan. Dan yang paling sekali lagi yang kami sampaikan waktu beberapa ahli itu kesimpulannya paling efektif tuh Roro dan Roro yang mana? tidak yang besar-besar, jadi mengangkut kontainer tidak yang besar-besar, ini untuk transportasi logistik dalam negeri gitu, cukup yang 20 *feet*, gitu, tapi untuk keluar silakan kapal-kapal besar.

Nah, artinya nanti kalau ini berjalan pelabuhan itu disiap, persiapkan semua, kemudian Trans Sumatera, Jawa, Trans Kalimantan, Sulawesi dan Papua, ini juga sudah selesai, ini efektif sekali, tinggal cabang-cabang dari

highway itu ke dermaga-dermaga atau pelabuhan, *nah*, ini yang kita harap, sehingga nanti kalau bayangan saya ke depan itu cita-cita kita juga harapan, gitu ya. Termasuk ODOL hilang, Pak, *over dimension overload*, jadi kalau ngangkut yang berat-berat *ndak* perlu lagi, Pak, di darat gitu, semua diangkut jalan laut. Dari Surabaya ke Medan misalnya, Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Sumatera gitu, ke Kalimantan dan sebagainya, ke Makassar. Ini yang harusnya, saya kira, saya pikir pasti ada ini suatu rencana, gitu, *planning*-nya, tapi *nah*, ini tentu ada penyesuaian-penyesuaian, harus disesuaikan sehingga kami ingin melihat ada rencana induk sistem transportasi logistik dan penumpang termasuk gitu, yang banyak memakai rencana tol laut itu, pelabuhan-pelabuhan. Jadi ini Pak Menteri mungkin ke depan kita, kita butuhkan dan perlu penjelasan, gitu ya, ke depan.

Nah, kemudian yang kedua, Pak, tadi disinggung juga kecelakaan bus. *Nah*, ini memprihatinkan gitu, apakah Kementerian Perhubungan ke depan itu sebaiknya mengeluarkan suatu regulasi gitu? Artinya, regulasi ini apa? SOP-nya gitu untuk terutama angkutan massal bus. Jadi ada perjanjian antara penyewa dengan perusahaan itu yang di situ berisikan hak kewajiban dan tanggung jawab masing-masing para pihak. *Nah*, ini-ini itu masuk di situ mungkin ada perjanjian masalah kesiapan busnya, gitu, untuk keamanan dan keselamatan, jadi ada harus dicek, gitu, harus KIR gitu, check juga apa yang paling penting itu rem misalnya dan sebagainya ya, rem, ban itu, ini yang-yang terjadi.

Jadi kejadian mengenaskan yang terakhir ya di Subang, gitu ya, di Ciater itu 11 meninggal anak-anak kita ini, karena mencarter satu unit bus yang *ndak* jelas, gitu, ininya, perjanjiannya, gitu. *Nah*, ini-ini seperti nyewa angkot aja, Pak, sekarang ya sewa bus, carter bus ya udah besok datang ya jam sekian datang, naiklah, itu massal, Pak, angkutan massal harus harus diatur, gitu ya. Saya kira ini ini perlu ke depan, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti kejadian yang sudah-sudah.

Nah, kemudian saya menyinggung juga, Pak, sama seperti Pak Boy. Jadi kami ini dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah di situ tidak bisa memperjuangkan, gitu, sebagai Anggota DPR termasuk juga pimpinan-pimpinan daerah juga, *wah* ini ya kenapa bandara kita jadi menurun nah statusnya. Mungkin, Pak, ke depan dicarikan solusi ya bebas-bebaskan saja gitu kalau yang sudah siap gitu, yang sudah siap untuk penerbangan internasional silakan gitu seperti tadi yang disampaikan Pak Lasarus. Artinya, paling-paling yang..., yang ada perubahan di bandara itu kan yang perlu dipersiapkan sistem keimigrasiannya gitu, kalau pelayanan pesawatnya sama saja, Pak, dari Singapura ke Palembang biasa waktu itu, pesawatnya tidak begitu besar, Airbus 320, gitu kan, dari Malaysia juga dari Kuala Lumpur seperti itu juga gitu.

Nah, saya menekankan bahwa, kami sangat kehilangan, gitu, banyak pekerja-pekerja dari Sumatera Selatan yang bekerja di Malaysia gitu, bekerja di tempat lain ya, *nah*, itu-itu menjadi sulit gitu termasuk juga kabar yang, yang terakhir umrah pun tidak bisa dari-dari Palembang. *Nah*, saya kira saya sudah

jelaskan boleh itu Pak Menteri pernah menyampaikan bisa *kok* itu, tapi ini-ni pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, Pak. Jadi mohon ini dievaluasi.

Saya kira bandara yang sudah siap untuk penerbang internasional dan ada minat dari operator pesawat yang, yang baik itu dalam maupun luar. Kita ini bukan ini, Pak, kalau ada alasannya, *wah* datang ini wisatawan mancanegara sedikit sekali, kita melayani rakyat kita, Pak, rakyat kita yang sekolah misalnya dari kami itu sekolah di Malaysia, ada bekerja di Malaysia, dia bolak-balik itu sulit, gitu. Kalau Singapura gampang kami, Pak, ke Batam cukup nyeberang ferry, tapi kalau ke Malaysia, ya jauh kita.

Jadi ini Pimpinan, mohon juga tadi pertimbangan-pertimbangan dan evaluasi yang pertama masalah kecelakaan dan kemudian masalah bandara.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Eddy Santana.

Dari Sumatera Selatan, kita kembali ke Kalimantan Barat, Pak Syarief Alkadrie, silakan.

F-NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,
 Pimpinan Komisi V,
 Rekan-rekan Komisi V yang saya banggakan,

Melihat memang rancangan APBN yang diajukan oleh Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 ini cukup signifikan juga penurunannya, karena memang kami pun menyadari kaitan ini berkaitan transisi. Namun dengan demikian, saya memohonkan ini kepada Bapak Menteri berkaitan dengan aliran Sungai Kapuas itu. *Nah*, ini karena sudah beberapa tahun sudah *ndak* dikeruk dan ini juga salah satu menurut para ahli yang menyebabkan terjadinya banjir, bahkan beberapa tahun yang lalu cukup dahsyat di Kalimantan Barat khususnya di wilayah perhuluan, karena memang kondisi sungai kita yang sifatnya datar.

Karena sudah ada kejelasan antara Menteri, Kementerian Perhubungan dengan pihak Pelindo dalam sisi pengelolaannya ini, saya mohon paling di tahun 2025 ini diprogramkan untuk pengerukannya, karena ini memang sangat penting Bapak, kaitan dengan efek daripada tidak dikeruknya Sungai Kapuas

itu dan sekarang ini hampir sudah setiap waktu hujan tinggi volumenya akan terjadi banjir.

Yang kedua, walaupun ini saya kira, tapi tidak apakah ini keluar konteks mudah-mudahan masih di dalam konteks, berkaitan dengan pengoperasionalan terhadap Pelabuhan Kijing, Pak. Saya kemarin melihat di sana itu belum begitu normal, bahkan *crane*-nya juga tidak ada. Saya kira dalam hal ini Menteri Perhubungan sebagai pemegang regulasi bagaimana untuk menekan kepada pihak Pelindo ini untuk cepat apa, cepat pelaksanaannya supaya dipusatkan sudah di Kijing itu. Karena kita berharap dengan Kijing ini bisa beroperasi tentu juga akan membantu terhadap dari bagi hasil, Pak, berkaitan dengan ekspor, sehingga ekspor-ekspor komoditi kita yang secara apa, diekspor ke internasional seperti CPO dan sebagainya, ini bisa lewat ekspor langsung dari Pelabuhan Kijing. *Nah*, tapi sekarang itu berkaitan dengan penunjangnya itu yang masih kesiapan dari dari pihak Pelindo itu yang saya ketahui belum siap.

Tentu saya berharap kepada Pak Menteri sebagai pemegang kebijakan ini untuk ya mempercepatlah supaya operasi itu. Tentunya itu akan membawa dampak, Pak, terhadap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dalam rangka untuk apa menambah kue pembangunan di daerah kita.

Kemudian yang ketiga, tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Lasarus dan kawan-kawan, kami sudah menanyakan itu. Cuma kami ingin menanyakan yang sangat mendasar berkaitan terhadap bandara-bandara ini bukan hanya Kalimantan Barat, kalau saya tidak salah cuma hanya 10 ya, atau beberapa bandara yang diperkenankan itu, padahal Kalbar itu juga termasuk salah satu yang banyak bepergian berkaitan dengan ini, kemudian juga kepulauan, karena banyak juga kita yang mengirim tenaga-tenaga kerja sebagai pahlawan devisa.

Maka saya bilang ke berapa, waktu yang lalu itu, ini kita ini apalagi kita ini sudah ada Perjanjian Sosek Malindo sebenarnya, Kalimantan Barat itu, tapi saya tidak tahu apa yang menjadi dasar gitu. Bahkan kemarin sempat juga mengemuka katanya Singkawang akan dibuka penerbangan langsung ke Taiwan, keluar, ini tentu ya saya kira sama saja itu, bahkan Pontianak itu lebih banyak melayani tempat lain, apakah itu cuma isu dan sebagainya, saya juga tidak tahu. Tetapi saya kira walaupun tidak seperti itu, ya cepat saja Bapak ganti itu, tidak lagi pelabuhan internasional, bandara internasional, tapi pelabuhan, bandara nasional saja, gitu.

Nah, jadi saya ini juga tentu merupakan pertanyaan walaupun Bapak sampaikan pada waktu itu kebijakan daripada Presiden berkaitan dengan apa tidak diberlakukannya apa bandara-bandara yang membuka penerbangan nasional. Tentu saya harapkan supaya jelas, Pak, dasarnya itu kaitan dengan itu sampai itu tidak apa tidak diberlakukan lagi sebagai pelabuhan, sebagai bandara internasional.

Saya kira itu pertanyaan dari kami.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak Syarif, terima kasih.

Ya, mengulas terkait bandara internasional yang tadi disampaikan Pak Boy dan saya ulas panjang lebar tadi juga.

Kemudian yang terakhir Pak dari Anggota, Pak Mulyadi.

F-GERINDRA (DRS. H. MULYADI, MMA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan, serta Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan, Pak Menteri bersama para Dirjen dan Pak Sekjen, dan Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan mitra Komisi V,

Setiap zaman ada masalahnya, setiap masalah ada zamannya ya, mudah-mudahan walaupun hari ini agenda rapat evaluasi dan pembicaraan untuk APBN 2025, mudah-mudahan tidak melemahkan semangat kita untuk terus memberikan dedikasi terbaik buat bangsa ini.

Pak Menteri, Bapak sudah membawa peradaban Indonesia dalam dunia transportasi ke titik yang luar biasa, Pak ya, kereta cepat dan seterusnya saya bisa merasakan itu, sampai ada apa produk-produk kereta panoramic dan seterusnya ya, di darat juga, di laut juga, di udara juga. Dan mudah-mudahan pada saat Bapak awal menjabat Menteri periode kedua, saya kira Bapak sudah menginventarisir target-target pembangunan yang Bapak akan laksanakan yang disesuaikan dengan misi-misi Presiden, Pak ya.

Namun, dalam konteks aktivitas, saya kira orientasinya pasti tiga ya, pembenahan, optimalisasi dan pengembangan. Apa yang ingin saya sampaikan, pertama tentu kami mengapresiasi, Pak, atas capaian-capaian yang sudah Bapak laksanakan bersama para Dirjen, Sekjen dan seluruh jajaran Bapak ya kami apresiasi walaupun dalam perkembangannya tentu ada hal-hal yang juga harus dievaluasi, Pak ya, apakah itu beban masa lalu atau beban hari ini ya yang juga harus menjadi bagian dari *legacy* Bapak, ya.

Nah, misalnya, izin saya identifikasi satu per satu, Pak, yang krusial saja ya, kita terima kasih dan apresiasi misalnya Kertajati di buka ya, tapi kemudian apa yang kita lihat optimalisasinya belum optimal ya. Tapi kenapa misalnya kemudian pembangunan Patimban dengan infrastruktur yang luar biasa ya yang dibangun konektivitasnya dan seterusnya itu tidak kemudian menjadi

dasar bagaimana kita menjadi peserta *beauty contest*, supaya apa, supaya pelabuhan-pelabuhan atau kapal-kapal yang mendarat di pelabuhan Singapura itu kenapa kita tidak lirik, gitu, supaya itu menjadi pasar baru untuk berbelok ke Patimban misalnya, Pak, akhirnya juga bisa menghidupkan Kertajati, gitu, ya Pak ya, kenapa? karena *traffic* akan menjadi tinggi itu para *businessman* dan seterusnya untuk masuk ke wilayah Kertajati. Karena apa? karena Patimbannya benar-benar bisa optimal dan kita bisa, mohon maaf, dalam tataran teknis Bapak-Bapak lah yang jago ya. Kita misalnya bisa melaksanakan kemenangan dalam konteks *beauty contest* pelabuhan destinasi itu, misalnya dengan penerapan tarif dan seterusnya, Pak ya. *Nah*, yakin Kertajati betul-betul bisa optimal dan Bapak juga sudah mengoptimalkan investasi Cisumdawu ya, kenapa? karena Cisumdawu juga masih terimbas sepi saya kira ya, itu Pak.

Kemudian izin, Pak, masalah terkait, *punten* Bu Dirjen Perhubungan Udara, Halim ya, kasih, Pak, *legacy* terbaik di Halim, kenapa? karena *traffic*-nya tetap tinggi itu Halim, kenapa itu tidak direvitalisasi besar-besaran, misalnya untuk menjadi, ya bandara kebanggaan Jakarta kedua ya, walaupun sekarang Bapak sedang bangun di IKN dengan hebat, tapi kan *traffic* mobilitas manusia Jakarta tetap tinggi sebagai bisnis *center* di internasional lah dalam tanda petik ya. *Nah*, saya kira Halim juga harus menjadi target Bapak, Pak ya, supaya itu segera direvitalisasi.

Kemudian terkait darat, izin, Pak Dirjen, tadi sudah dibahas ya kita setiap tahun selalu membahas masalah ODOL dan seterusnya. *Nah*, saya kira ini adalah masalah penegakan hukum saja ya. Kenapa? biaya preservasi jalan yang saya dengarkan hampir, saya kebetulan di Banggar juga, Pak, hampir 50 triliun, gitu ya, dan kerusakan ini kan kontribusinya dari ODOL-ODOL ini, Pak ya. *Nah*, ini harus menjadi catatan pada saat Pak Menteri menjelang, sama bermitra di Komisi V di periode ini untuk betul-betul menjadi catatan untuk Kementerian Perhubungan ke depan ya, kenapa tadi, Pak, biaya preservasi jalan dan seterusnya

Di pemerintah juga ada produk dari dari revisi undang-undang, revisi Undang-Undang Jalan, Pak ya. *Nah*, saya kemarin masih mencoba, Pak, wilayah dari wilayah Banten sampai ke wilayah Jawa Barat terkait pembangunan Pantai Selatan, masih belum tersentuh maksimal, Pak, terkait rambu lalu lintas dan seterusnya. Itu juga harus menjadi atensi, Pak, supaya menggeliatlah roda ekonomi di samping opsi lintasan di wilayah Selatan.

Kemudian izin, Pak, yang darat juga saya berharap negara ikut mengintervensi, Pak, Parung Panjang, Pak ya, itu menyedihkan, Pak ya seperti ada pembiaran ya. Sekarang sudah ada solusi sementara dengan membuat kantong parkir, diintervensi juga oleh hal-hal yang tidak legal, Pak ya, pungli dan seterusnya, akhirnya si truknya enggak mau lagi masuk kantong, karena ada pungutan-pungutan liar dan segala macam. *Nah*, kenapa izin, Pak, diintervensi, Pak, supaya ada semacam *coaching* atau apalah gitu, dari pusat, gitu, dari Dirjen Perhubungan Darat, Pak. Pak Dirjen, izin barangkali dipanggil saja itu Pak Kepala Dinas Perhubungan Darat dari provinsinya, karena itu jalan provinsi dan saya dan teman-teman sudah berkunjung ke sana, memang sangat *crowded*, Pak, bahkan saya terjebak macet di tengah truk yang panjang,

bahkan di waktu itu sekitar jam 00.30 pagi, Pak, itu sudah kayak kereta, gitu, negara seperti tidak hadir membiarkan masyarakat tersiksa dengan jalan yang rusak, rambu-rambu lintas terbatas dan tidak ada petugas sama sekali.

Nah, itu saya kira harus meningkatkan kepekaan itu, Pak, termasuk mungkin izin dari Kepala Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek, ayo, Pak, kalau boleh survei bareng-bareng, Pak, gitu kan, supaya kita benar-benar bisa hadir di tengah masyarakat yang mereka sampai putus asa kita harus *ngadu* ke mana lagi, katanya. *Nah*, ini kan sayang, Pak, sementara itu sumber tambangnya itu untuk material Jakarta dan Tangerang, Pak, dan itu katanya masih sekitar 70 tahun lagi itu masih bisa di-eksploitasi untuk bahan baku pembangunan di wilayah Jakarta dan Tangerang. *Nah*, saya kira negara harus hadir dalam konteks mengidentifikasi masalah-masalah krusial di tengah masyarakat.

Terakhir, Pak Menteri, terima kasih atas kerja sama selama ini ya. Mudah-mudahan terus kita berjuang memberikan kontribusi terbaik dengan sisa masa jabatan, sehingga kebijakan-kebijakan kita menjadi *legacy* yang jadi solusi.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Mulyadi.

Masih ada dari Anggota? Ya, Pak Hamka, kemudian nanti Bu Sri dan Pak, terakhir ditutup oleh senior, Pak Tamanuri.

Silakan.

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan,

Pertama, saya menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, hanya, hanya ada yang saya titipkan dulu Pak Menteri, bahwa semua apa yang kita sepakati dalam anggaran tahun 2024 ini, itu dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang ada, kecuali terjadi AA. Kenapa saya sampaikan seperti ini? agar supaya semua janji-janji kami sebagai Anggota DPR juga termasuk

la

Presiden tentu ke depan, apalagi Anggota DPR yang jalan sekarang, itu dapat dipenuhi janji-janjinya pada tahun ini juga. Pasti ada usulan-usulan kami tahun 2024, kalau *toh* tidak bisa, tolong dijelaskan kenapa tidak bisa ya, ini yang saya harapkan untuk tahun anggaran 2024.

Untuk ke depan, memang kita tidak usah terlalu pesimis terhadap turunnya anggaran 15 triliun, karena masih bekerjanya proses transisi ini, ya. Saya kira yang paling penting apa yang disusun oleh teman-teman, oleh Pak Menteri dan seluruh jajarannya dapat tergambar apa yang menjadi pengurangan dari 15 triliun itu, itulah yang akan kita bahas nanti dan *Insyah Allah*, nanti mudah-mudahan bekerjanya proses transisi ini tentu ada janji-janji politik dari Presiden terpilih, itu yang menjadi skala prioritas yang utama, tetapi tidak berarti tidak melanjutkan pembangunan perkeretaapian misalnya, tidak melanjutkan pembangunan laut, darat dan udara, hanya saja untuk menyesuaikan dulu apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih dengan semua program yang ada.

Ini saya akan sampaikan Pak Menteri, bahwa tidak usah kita terlalu pesimis dengan 15 triliun berkurang. Mungkin pada bulan Januari *Insyah Allah*, mungkin bisa tertutupi kembali karena itu adalah terkait pada RPJMN kementerian, ya. Perkiraan APBN yang akan datang pasti naik, Pak Menteri. Diperkirakan naiknya itu kalau yang lalu 3.325 triliun, perkiraan naiknya ini menjadi 3.500 triliun, Pak Ketua, itu perkiraan, karena adanya penyesuaian program-program Presiden terpilih atau janji-janji politik Presiden terpilih yang harus dianggarkan pada anggaran tahun 2025.

Kita menunggu tim transisi dan kita juga menunggu pidato kenegaraan pengantar nota keuangan pada bulan Agustus yang akan datang. Oke, kita akan bahas nanti 25 triliun itu apa-apa saja, yang 15 triliun apa yang terkait yang sangat *urgent*, Pak Ketua, itu akan menjadi perjuangan kita yang selama ini, selama periode yang lalu tidak pernah ada APBNP, karena ada Perpu akibat adanya pandemi Covid-19 yang lalu, tapi ke depan *Insyah Allah* akan ada APBNP, mungkin Januari setelah masa transisi ini bergeser dan dialihkan dan semua bekerja sesuai dengan program yang diinginkan oleh Presiden baru.

Oleh karena itu, saya hanya titipkan, Pak Menteri, usulan-usulan kami tahun 2024 ini, tolong paling tidak dapat dipenuhi pada masa jabatan kita yang 2024 ini. Misalnya ada teman-teman minta apakah PJU dilanjutkan atau tidak? kalau memang tidak berikanlah penjelasan kepada kami kenapa harus tidak? apakah diakibatkan dengan AA, *automatic adjustment* dan sebagainya, dan sebagainya? akhirnya kita bisa tahu dan kita bisa memprogramkan ke depan yang terbaik.

Ini saja yang saya ingin sampaikan, Pak Ketua, bahwa apa yang Pak Menteri sampaikan ini, dalam *paper* ini, ada kekurangan anggaran, *Insyah Allah* tidak usah kita terlalu pesimis dan kita akan bahas nanti apa yang harus dilakukan lagi, dilanjutkan lagi, tentu menyesuaikan keinginan-keinginan atau janji-janji politik dari Presiden terpilih.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Catatan dari Dapil saya, khusus ke Pak Dirjen Darat ada yang saya usulkan itu, Pak, LPJU jalan nasional Kabupaten Selayar yang sudah 2 tahun berturut-turut saya mintakan juga belum terealisasi, alasannya adalah *automatic adjustment*. Kalau memang terpaksa seperti itu tolong dijelaskan dengan baik, dan yang lain-lain tentu dengan kawan-kawan yang lainnya.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Billahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Hamka.

Ya, kalau bisa *automatic adjustment*-nya jangan kena program Pak Hamka lah, gitu, ya Pak Hamka, ya *kok* kayak dibidik, gitu loh, punyanya Pak Hamka dimatiin, misalnya ya. Pak Menteri, mudah-mudahan tahun 2024 *automatic adjustment*-nya tidak menyasar usulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman terkait dengan program-program prioritas di Dapil masing-masing, setuju ya kawan-kawan ya? Ya, ya biar Pak Menteri juga punya kenangan manis lah buat kita gitu loh, karena sudah berapa kali *automatic adjustment* selama 5 tahun ini banyak program-program di usulan teman-teman yang tidak bisa dilaksanakan.

Baik.

Bu Sri Rahayu, terakhir nanti Pak Tamanuri.

F-PDI PERJUANGAN (DRA. SRI RAHAYU):

Makasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Saya hanya hal yang sederhana yang ingin saya sampaikan terkait dengan SDM. Di dalam tema dan arah kebijakan RKP 2025 antara lain di bidang ekonomi eksklusif dan ke dan berkelanjutan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan antara lain pada poin ekonomi eksklusif dan keberlanjutan ada salah satu poinnya adalah peningkatan partisipasi perempuan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja.

Ini bagi Kementerian Perhubungan, apakah sesuatu yang baru atau sudah berjalan? kalau sudah berjalan terutama yang difabel atau disabilitas ini khususnya menyangkut pekerjaan yang ada di Kementerian Perhubungan. Sudahkah ada yang direkrut sebagai tenaga kerja? dan kalau ada ditempatkan

di mana? dan berapa persen jumlah yang sudah? kalau memang belum bagaimana strateginya ke depan untuk hal ini?

Menurut saya penting, karena mohon maaf, Pak, makin lama di, di Republik ini banyak juga orang yang difabel dari berbagai macam persoalan dari sudut Kesehatan, mulai dari karena faktor lingkungan terutama maupun dari faktor orang tua itu sendiri, sehingga ini perlu dipikirkan ke depan. Apapun itu sumber daya manusia dari kita.

Kemudian yang kedua, saya sekali lagi mengingatkan dan meminta evaluasi. Saya mohon dengan hormat dan sangat, kalau memang pembangunan itu adalah *multiyear*, tentu *multiyear*-nya yang berakhir pada tahun 2025 atau 2026. Dan harapan saya pembangunan terminal tipe A tolong dihentikan dulu, untuk di-evaluasi, karena memang dalam kenyataannya tidak seperti atau belum seperti yang kita harapkan. Saya selalu minta satu persatu mengevaluasi-mengevaluasi hal tersebut, karena apa? karena supaya uang yang memang dibuka buat investasi yang harapannya adalah akan menyumbang BNPB bagi kita, tapi pada kenyataannya justru akan banyak menyedot pembiayaan untuk hal tersebut.

Oleh karena itu, di tahun 2025 ini mohon jangan ada yang baru lagi dulu. Kalau memang *multiyears* silakan dilanjut, karena sudah berjalan mungkin seperti yang kemarin pernah kita kunjungi di Blora, itu kan sudah ada tiang pancang dan seterusnya sudah berdiri, silakan itu dilanjut, karena kenyataannya tidak semudah yang kita hanya membangun, kemudian tanpa juga memperhatikan dan memikirkan konektivitas..., konektivitas dari transportasi yang lainnya.

Demikian juga sekarang faktor dari transportasi kendaraan yang beredar juga tidak selalu, tidak terlalu banyak, bahkan sekarang, sekarang masyarakat sering sudah suka atau mulai suka menggunakan transportasi kereta api, makanya itu juga harus menjadi pertimbangan. Karena saya ingat, seingat saya ada juga akan dibangun di Nganjuk juga *tuh*, kalau enggak salah untuk terminal tipe A, mohon ini menjadi perhatian. Apalagi nanti di Kabupaten Kediri sudah ada, sudah banyak apa penerbangan nanti pasti itu kan juga menjadi problema atau persoalan juga.

Yang terakhir sedikit, Pak Menteri, di dalam programnya saya belum baca secara utuh, pasti ada apa nama namanya program padat karya. *Nah*, program padat karya ini tolong dilihat betul seberapa besar ongkos yang diberikan kepada tenaga kerja, jangan sampai di bawah standar yang sudah ditentukan, karena banyak para pe..., apa pemenang lelang itu karena tidak dibangun secara langsung oleh mereka, kemudian menggunakan subkontrak-subkontrak, pada akhirnya tenaga kerja yang ada di paling bawah, paling ujung, itu tarifnya justru jauh di bawah UMR, kalau dihitung secara total. Ini tolong menjadi perhatian dalam hal pengawasan, jangan sampai masyarakat kecil yang jadi korban, sehingga yang mereka seharusnya tidak diambil, tetapi malah justru menjadi korban untuk mendapatkan ongkos yang di bawah.

Demikian juga terkait dengan keamanannya K3-nya juga menjadi perhatian hal tersebut, supaya orang-orang kecil yang bekerja itu juga mendapatkan kenyamanan dan keamanan ketika mereka melakukan pekerjaan, karena banyak yang tidak mendapatkan perhatian baik itu di Kementerian PUPR maupun perhubungan, itu kurang mendapatkan perhatian untuk hal tersebut. Tolong ini menjadi perhatian bagi Kementerian.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Bu Sri Rahayu.

Terakhir Pak Tamanuri, silakan.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Pimpinan beserta para wakil Ketua,
Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Dewan,
Yang saya banggakan Pak Menteri beserta jajarannya,

Saya dari tadi mengamati, jam 11 saya ke sini mengamati, ini benar-benar rapat pada hari ini syahdu, syahdu, Bapak Lasarus mimpinnya juga agak kalem, tidak menggebu-gebu kayak mau nangis, begitu juga tanggapan Pak Menteri, kadang-kadang tidur, kadang-kadang bangun, jadi ini benar-benar kondisinya syahdu hari ini, saya enggak tahu apa sebabnya, tapi yang jelas semuanya itu adalah untuk kepentingan kita bersama.

Pertama kali saya apresiasi, Pak, itu yang saya katakan terus masalah kapal ferry yang pergantiannya memakan waktu, sekarang luar biasa. Jadi begitu sampai yang dari satu yang sandar langsung berangkat, berarti ini setidaknya-tidaknya menghilangkan setengah sampai 1 jam. Saya berterima kasih, Pak, berarti Bapak pikirkan ini, berarti Bapak sampaikan.

Kemudian juga saya berterima kasih kepada Bapak yang tadinya penerbangan dari Bandara Taufik Kiemas satu kali, sekarang sudah jadi tiga kali seminggu, *nah*, ini satu penambahan, yaitu untuk meningkatkan roda perekonomian orang-orang Krui dan pantai situ, ditambah lagi adalah wisata selancar. Ini orang-orang luar negeri banyak sekali, katanya selancar yang paling baik di dunia adalah di situ, *nah*, ini sudah luar biasa.

Kemudian ada usulan, saya ngikuti jalan setiap hari kadang-kadang kalau kereta lewat sampai setengah jam lewat, nunggu ngantri karena belum bisa apa itu nyebrang. *Nah*, ini apakah ada enggak ada pikiran Bapak untuk dapat secara *ek underpass* ataupun *bypass*. Selektif, Pak, bukannya semua,

terutama kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, karena ini menyangkut kelancaran juga ini, sedangkan daerah-daerah lain saya juga di Lampung ada dua Bapak bangun itu, ada dua Bapak bangun, saya terima kasih.

Kemudian masalah kecelakaan lalu lintas, di situ sudah terus-menerus dikatakan karena rem blong, karena rem blong. Apakah ada, enggak ada upaya kita untuk menangkal ini? lebih dari situ pun kita bisa mengetahui, bahwa ini rem sudah enggak benar lagi. Apakah alat yang ditempel situ sudah ngerti kita, bahwa rem ini sudah enggak benar lagi, selain daripada KIR yang diadakan setiap tahun. Kenapa? karena saya tahu bahwa kemajuan teknologi kita, jangankan lagi itu kapal terbang, kereta cepat, Bapak bisa laksanakan dengan deteksi dini, apalagi seperti ini, hanya saja karena kita tidak terlalu sensitif menghadapi hal ini, tapi akibatnya setiap saat kalau dia terbalik 10, 15 orang yang meninggal dunia. Jadi ini mohon perhatian.

Saya rasa demikian, Pak.

Nah, satu lagi, Pak, ini jangan sampai terjadi lagi, karena dulu PU dua terjadi yang enggak enak, dari 38 provinsi hanya 6 provinsi yang dapat, apa katanya? karena judulnya di Bappenas berbeda, ada yang dapat, ada yang enggak, apa itu, Pak Robby, ada yang judulnya itu bisa ditolelir, dapat, ada yang tidak, saya termasuk tidak, jadi saya dibanding-banding sama kawan. Akhirnya apa? akhirnya Bapak enggak nolong saya, Pak, malah menghancurkan suara saya.

Nah, ini mohon maaf, enggak apa-apa, *nah*, jadi itu, tolong yang akan datang ini. Kalau memang bagi, bagi semua, kalau enggak, enggak, termasuk mobil, Pak. Mobil itu hanya dipakai oleh pengurus yayasan, bukan digunakan untuk anak sekolah, jadi udahlah enggak usahlah itu untuk apa pening-pening Bapak.

Saya rasa demikian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Pak Tamanuri.

Kok, Pak Tamanuri tadi bilang di awal ngomong, saya mimpinnya syahdu, kayak mau nangis, nanti kalau saya suruh Pak Roberth ngegas, Pak Tamanurinya kabur pulang, ya Pak Hamka ya, baru dia bilang: "saya di ruang makan, Pak, gara-gara Pak Roberth, Pak Lasarus, ayam tidak berkokok", dia bilang. Ini Pak Tamanuri kalau enggak ada Bapak sepi ruangan ini, Pak.

la

Baik, dari meja Pimpinan selesai, eh dari meja Anggota, sekarang dari meja Pimpinan, saya persilakan mungkin Pak Roberth duluan, nanti baru Pak Ridwan.

Silakan Pak Roberth.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Baik, terima kasih.

Ketua dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati dan saya banggakan,

Saudara Menteri Perhubungan dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Yang pertama, saya kira kita bicara sesuai dengan judul, kita evaluasi APBN 2024. Saya ingin menyampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri di dalam penyerapan anggaran 2024, saya kira sudah cukup baik dan mudah-mudahan bisa tercapai targetnya, tapi kita bicara tentang RKP tahun anggaran 2025, ini kita pembicaraan pendahuluan, Saudara Menteri, maka saya lihat tadi ada pengurangan anggaran ya anggaran 2025 hampir berkurang 13,8 sekian triliun dari anggaran 2024, ya.

Kalau melihat itu, menurut saya berarti pemerintah atau Presiden melihat bahwa program-program di dalam Kementerian Perhubungan mungkin sudah cukup tercapai ya, maka anggaran yang diberikan ini tidak lagi sebesar seperti 2024 karena program-program yang menjadi utama dari visi misi Presiden mungkin sudah banyak yang tercapai.

Untuk itu, saya ingin menyampaikan pada kita semua, bahwa di dalam kemarin kita menghadapi pemilihan umum legislatif, kita semua banyak masih mempunyai tanggung jawab utang politik kita kepada masyarakat kita di daerah. Untuk itu, Saudara Menteri dan seluruh jajaran, harapan saya sesuai dengan undang-undang, posisi kami adalah mewakili rakyat dan kami disumpah untuk memperjuangkan aspirasi dari daerah kami.

Maka saya mohon kepada Saudara Menteri dan seluruh jajaran, agar di dalam kami membahas tahun anggaran 2025 ini, betul-betul tolong berikan ruang yang lebih kepada kami, Anggota, untuk bisa program-program kami itu bisa masuk ya. Karena ada seperti tadi, Pak, disampaikan teman saya senior yang ada di samping saya ini sudah berapa kali ya, katanya programnya kena AA itu. Saya harap supaya ini tidak lagi, karena saya pun beberapa ada dua program saya yang mungkin nanti saya akan minta, karena ini sudah hampir tahun ketiga ini yang belum terakomodir di dalam setiap kali kami melakukan pembahasan anggaran.

Maka ke depan saya kira ini perlu mendapat perhatian khusus Saudara Menteri dan seluruh jajaran, dan kepada teman-teman semua sudah saatnya sebelum kita selesai tanggal 1 Oktober nanti ini betul-betul kita semua yang ada di sini bisa menunjukkan kepada masyarakat kita untuk bisa memberikan manfaat di dalam pembahasan anggaran tahun 2025 ini.

Dan saya kira Pak Saudara Menteri dan sudah selesai program-programnya, maka 2025 mohon diberikan kepada kita Anggota ya. Mungkin ini yang perlu untuk kita semua sepakat agar nanti di dalam pembahasan, ya tolong disiapkan betul-betul ruang-ruang untuk kami Anggota ya, karena sekarang ini kami bicara tentang pendahuluan, inilah yang kami mendahulukan masuk sebagai komitmen kita dan kita minta juga kepada Saudara Menteri dan seluruh jajaran nanti.

Saudara Ketua, saya minta supaya nanti di dalam kesimpulan nanti itu jelas di sana kita mengikat, supaya kalau memang nanti tidak ada tertera di sana, tidak menggambarkan bahwa aspirasi dari Anggota ini tidak ada, maka kita tolak, karena cuman ada dua kata yang ada, yaitu, pemerintah datang ke kami untuk meminta persetujuan, ya dan tidak, terhadap anggaran ini, lain daripada itu tidak. Cuman dua kata saja, kita setuju dan tidak, maka kalau tidak tercapai kesepakatan, maka kami tolak itu ya.

Saya akan ngomong secara tegas ini kepada Saudara Menteri dan seluruh jajaran, karena ini hak konstitusi kita yang kita sudah selama ini kami mendukung sepenuhnya seluruh program-program pemerintah, dan menurut saya ini sudah selesai pemerintah ini, sudah selesai di ujung. Ke depan kami akan berbicara, kami yang mungkin kembali mungkin kalau kembali juga di sini kami akan kembali dengan program-program pemerintah baru ya, ke depan, maka inilah saatnya kita bisa mendudukan posisi kita betul-betul untuk tidak lagi selesai dan saya ingin kepada seluruh jajaran Saudara Menteri agar kita selesai di sini tidak ada kecewa, bahwa oh ya benar kita sudah selesai dengan Saudara Menteri dan seluruh jajaran ya periode ini, itu dengan baik, kita semua bisa menerima dengan baik, tidak ada catatan kita yang ini jelek, yang itu jelek.

Jadi, inilah saatnya bagaimana Saudara Menteri menunjukkan bahwa Saudara Menteri dan jajaran itu adalah mitra kita yang betul-betul saling menghargai dan saatnya sekarang kami minta itu ya. Saya tegaskan sekali lagi, kami minta itu untuk bisa betul-betul, karena sudah selesai kan tadi saya sampaikan, Saudara Menteri tidak punya kepentingan lagi ke depan, sudah habis ya, pemerintah yang ini Bapak Jokowi dan seluruh jajaran sudah selesai. Kami akan masuk dengan pemerintahan baru Saudara Presiden Bapak Prabowo dan jajaran nanti ke depan.

Jadi itu yang ingin saya sampaikan, Pak Ketua, terima kasih. Saya kira inilah kita semua yang ada di sini untuk bisa mewujudkan ya keinginan atau mimpi-mimpi kita yang selama ini teman-teman itu bersungut semua bahwa ini tidak terakomodir, ini tidak terakomodir. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir ini saya himbau kepada Saudara Menteri dan seluruh jajaran agar kita bisa betul-betul dengan hati yang tulus semua kita membahas ini ya dan kita saling menghargai yang tadi saya sampaikan, agar betul semua program-program kita yang belum selama ini masih terhalangi ya, saya cuman dua program yang selama ini belum akomodir itu ya saja nanti saya akan berikan kepada Saudara Menteri melalui Dirjen ya. Ada dua Dirjen yang nanti saya akan berikan proposal kami.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, silakan.

Makasih Pak Roberth.
Pak Ridwan Bae selanjutnya.

F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Roberth,
Teman-teman Anggota Komisi V yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

Saya cuma ingin menginformasikan begini Pak Menteri, kebetulan kan di bulan 10 ini sudah akan berakhir kita, untuk periode kepemimpinan Pak Joko Widodo. Masih banyak bandar udara di seluruh Indonesia ini yang bandaranya ada, tapi pesawatnya tidak ada, masih banyak, termasuk di Sulawesi Tenggara. Mungkin perlu ada pantauan tersendiri, kira-kira bagaimana bisa empat apa, 4 bulan ini dibicarakan dengan semua Ka.bandaranya, dengan maskapai-maskapai yang ada, sehingga semua bandara itu bisa apa namanya, memiliki pesawat mereka, bisa ada transportasi. Karena penumpangnya ada, tapi kadang kala juga pesawatnya enggak sempat, maskapainya tidak masuk di situ, Pak Menteri. Mungkin barangkali di apa namanya, Pak Dirjen, Ibu Dirjennya bisa segera mengambil langkah-langkah konkrit tentang itu.

Contoh misalnya di Kabupaten Muna itu Sugi Manuru. Sugi Manuru itu begitu bagus bandaranya, Pak, Bapak sudah bangun begitu bagus, tetapi pesawatnya sampai sekarang belum ada. Pernah pada tahun 2019, itu sampai tiga kali penerbangan tiap hari, karena penumpangnya ada, tiba-tiba sekarang sudah tidak ada dicarikan lagi yang baru oleh Ka.bandaranya, dia cari pesawat yang lain yang mau tetapi landasannya atau apa *runway*-nya kurang Panjang, sehingga tidak bisa yang muatan 90 tidak bisa masuk di situ, muatan 90 orang. Mungkin barangkali dari Kementerian Perhubungan menjadi pemikiran.

Jujur, Pak, pengetahuan saya, Pak Menteri sudah sangat berbuat banyak untuk Indonesia ya, bahkan Sulawesi Tenggara merasakan betul, Bapak sudah hampir semua pelabuhan di pelabuhan laut di sana sudah terpenuhi semuanya. Kemudian ferry juga sudah hampir terpenuhi semua di Sulawesi Tenggara, Pak, moda-moda transportasi juga terjadi perbaikan-perbaikan yang baik, ini adalah kerja keras Pak Menteri dengan seluruh jajaran tentu kita perlu apresiasi.

Cuma satu di Sulawesi Tenggara, satu mungkin Pak Dirjen Perhubungan keluar ya, Pak Dirjen tadi Perhubungan, Perhubungan Laut, Perhubungan Laut. Ada itu di mungkin Pak Sekjen bisa catat ini, ada derma..., apa Pelabuhan Munse namanya, Pelabuhan Munse, itu sepertinya itu ada anggaran 51 miliar kalau saya tidak salah, sudah dikerjakan, sudah selesai, hanya masih dalam tahapan pemeliharaan. Penghubung antara yang beton ke laut itu, Pak Menteri, dengan yang di darat kurang lebih 17 sampai 20 meter itu runtuh, runtuh kenapa? karena kena ombak yang keras di sana, karena secara kebetulan kalau musim timur memang ombaknya sangat besar.

Nah, oleh karena itu, dia roboh itu gara-gara mungkin perencanaannya. Saya pernah bicara dengan KUPP-nya, namanya Pak Lanto, itu perencanaannya rupanya sedikit keliru mungkin, karena dia tidak menghitung ombak yang keras di situ akan menghantam pasir-pasir yang di bawah timbunan batu gunung, yang pada akhirnya pada satu ombak datang itu pasir tergerus yang mengakibatkan rabat beton yang di atas itu, Pak Menteri, turun, runtuh di situ, jadi kurang lebih 17 sampai 20 meter. Namun sekarang ini setelah saya bicara sama KUPP itu sudah sementara dikerjakan oleh kontraktornya, udah dikerjakan.

Maksud saya, adalah kalau memang sedikit ada kurang perencanaan, mungkin barangkali diselesaikan Kembali, sehingga pada saat ombak keras itu dia tidak terpengaruh dengan ombak yang ada itu. Itu kira-kira harapan kita, Pak, untuk disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Laut, karena di media sosial itu banyak sekali yang viral, apa segala dikatakan, sepertinya ada suatu kesulitan atau ada suatu musibah, tetapi bahwa sudah mulai ada pergerakan-pergerakan yang negatif oleh media sosial. Mungkin barangkali kalau itu segera-segera selesaikan, karena saya tanya ke OPP-nya dan sudah dikirim juga fotonya kepada saya, kontraktornya sudah, sementara mengerjakan itu penyesuaian, tapi kalau dia kerjakan lagi seperti itu misalnya tanpa penyesuaian perencanaannya sesuai dengan ombak yang keras di situ misalnya, itu juga tidak ada guna-gunanya, Pak, akan rugi percuma lagi kembali.

Oleh karena itu, barangkali ini menjadi perhatian khusus sebelum berakhir masa kepengerus apa periode ini, Pak. Barangkali itu Pak Menteri dari saya.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Terima kasih, Pak Ridwan.

Pimpinan dan Anggota Komisi V,

Sekarang sudah jam 14 lewat, eh jam 13 lewat 37 menit ya, sudah cukup siang kita belum istirahat siang juga. Iya, sudah masih bisa shalat, belum shalat dzuhur ya, masih bisa, sebentar lagi *nih* Pak Menteri.

Saya rasa saya tidak perlu mengulas panjang lebar oleh apa yang disampaikan oleh teman-teman, masukkannya sudah sangat banyak, tapi untuk APBN 2024 atau masa jabatan 5 tahun terakhir kabinet Presiden Jokowi dan masa jabatan Pak Menteri juga ya sudah masuk tahun kelima, berarti ini program terakhir di pemerintahan yang sekarang.

Oleh karenanya, seperti di awal tadi saya sampaikan Pak Menteri hendaknya apa yang sudah menjadi program prioritas kita selama 10 tahun dan 5 tahun terakhir, saya harap kita bisa fokus untuk mengejar serapan maksimal yang bisa dilakukan. Dan tadi teman berpesan sekarang kan masih bulan, masuk ke bulan Juni ya, tentu yang disampaikan oleh teman-teman tadi hendaknya *automatic adjustment* ini tidaklah nanti mengakibatkan usulan pendapat dan saran teman-teman yang sudah disampaikan Kementerian Perhubungan nanti justru tidak terlaksana.

Nah, ini juga baru selesai Pemilu, ya tentu sebagian mungkin juga menyampaikan bahwa akan ada program A, B, C, D di sini yang diusulkan oleh teman-teman. Ini kebijakan sepenuhnya pelaksanaan ada di kementerian selama itu memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Untuk mempersingkat waktu, Pak Menteri, dan kita masih bisa shalat *Dzuhur*. Saya rasa nanti jawaban singkat saja dari Pak Menteri nanti ada jawaban tertulis, karena kita nanti akan ketemu lagi, Pak ya, setelah nanti apa namanya, pemerintah menyampaikan nota keuangan tanggal 16 Agustus, kita akan membahas lebih detail dengan apa namanya direktorat jenderal terkait, terkait dengan saran, pendapat dan usulan untuk tahun 2025, juga evaluasi serapan sampai nanti dengan kita mengadakan Raker kembali sejauhmana serapan, terutama nanti dapat disampaikan oleh Pak Menteri program usulan saran dan pendapat teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan *automatic adjustment* tidaklah nanti justru mengabaikan program yang sudah diusulkan oleh teman-teman.

Saya rasa setuju teman-teman ini kita persingkat ya, nanti detailnya dijawab tertulis, setuju ya?

Saya persilakan Pak Menteri supaya kita tidak melewati jam shalat dzuhur, saya persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih.

Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan para Anggota,

Yang pertama, berkaitan dengan catatan Pak Ketua tentang bagaimana kita fokus untuk menyelesaikan program program 5 tahun terakhir ini kita akan maksimalkan dan juga serapannya yang akan kita maksimalkan. Saat ini relatif sudah di atas rencana, kami akan upayakan juga PNPB-nya akan meningkat.

Yang kedua, saya setuju tentang apa yang menjadi aspirasi, kita akan upayakan dimaksimalkan baik di tahun 2024 maupun 2025, agar mata, telinga yang dilakukan oleh Bapak-Bapak itu bisa terlaksanakan dengan baik. Dan secara umum saya sampaikan bahwa masukan ini akan kami inventarisasi dan kami akan menjawab secara tertulis dan nanti pada saat para Dirjen melakukan pembahasan dengan Bapak-Bapak dan Ibu ini akan kami siapkan jawaban yang lebih konkret.

Demikian, Pak Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih.

Saya mendengar tadi semuanya merasa hubungan kita dengan Pak Menteri selama 5 tahun kita bersama di Komisi V dan saya 10 tahun, Pak, dan beberapa kami juga ada yang 10 tahun bersama Pak Menteri di ruangan ini untuk berdiskusi. Kita terkadang seperti yang Pak Irwan tadi sampaikan, terkadang kita canda, tawa di sini, terkadang juga agak sedikit serius ya dengan nada yang sedikit naik.

Hari ini tadi Pak Tamanuri mengatakan saya lembut dan meng, lembut dan mengalun-alun ya, sendu, gitulah, kalau-kalau sama ini dibelai-belai gitu lembut kan ya. Jadi ada banyak cerita di ruangan ini bersama Pak Menteri. Kita bersama-sama suka, duka tujuan kita sama, Pak, ya bagaimana kami melaksanakan tugas kami sebagai legislator yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi daerah kami masing-masing baik dari Dapil kami maupun dari Dapil teman-teman fraksi yang tidak semua juga semua daerah ada di sini.

Ya, tentu Pak Menteri, saya juga mengucapkan terima kasih atas seluruh kebersamaan kita dan atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga manakala dalam rapat ini selama 10 tahun bahkan 5 tahun terakhir ini khususnya ada hal-hal yang kurang berkenan baik kepada Pak Menteri, Pak Sekjen, para Dirjen, seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, dan seterusnya, baik yang ada di ruangan ini atau mungkin juga *monitor* secara *online* ya karena ini juga *live* rapat ini. Dari daerah kami menyampaikan terima kasih atas seluruh atensi dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan sepanjang waktu yang kita lewati bersama.

Marilah kita bersama tepuk tangan untuk kebersamaan kita semua.

(TEPUK TANGAN DARI SELURUH PESERTA RAPAT)

Pak Menteri sehat *wal'afiat* selalu ya, nanti kalau sama-sama pensiun kita, Pak Menteri, boleh kita telepon-telepon, kita nge-*wine* di luar bersama cerita-cerita, ya kan, nostalgia boleh Pak Hamka ya, boleh ya? Baik, iya, oh pasti Pak Boy, Pak Boy pasti kita ajak ya, Pak Boy pasti kita ajak.

Baik, kita langsung menuju kepada kesimpulan rapat, silakan ditayangkan.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW):

Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oh ya, Pak Roberth dipersilakan.

F-NASDEM (ROBERTH ROUW):

Ini karena tadi kita bicara pendahuluan, saya kasih dari dahulu *nih*, Pak, proposal saya jangan sampai hilang lagi, dua ini.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oh, silakan Pak Roberth, silakan. Saya tahu Pak Roberth ini biasanya selalu mendahului, silakan Pak Roberth. Tolong difoto walaupun sudah selesai Pemilu tolong difoto. Iya, Pak Robeth menghadap ke kanan, Pak Robeth, iya silakan.

Iya Bu Iren silakan ya, masih ada yang lain? Pak, silakan Pak, iya Pak silakan, siapa namanya, Pak Tubagus silakan, Pak Tubagus. Biasanya Pak Willem, mana Pak Williem, Pak Willem Wandik? ada bahan yang mau diserahkan belum? *Oh*, belum-belum ya. Nanti bisikan yang lebih panjang nanti kita nge-*wine* aja, Pak, iya.

Baik, ya terima kasih, silakan.

Saya bacakan draft kesimpulan rapat, sudah terasa mulai lapar ini.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, 5 Juni 2024

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per 31 Mei 2024 sebagai berikut:

- a. Realisasi keuangan 32,23%; dan
- b. Realisasi fisiknya lebih tinggi 35,32%.

2. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang pagu indikatif tahun anggaran 2025 Kementerian Perhubungan sesuai surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-346/MK.02/2024 dan B-2021/D.8/PP.04.03/04/2024, hal: Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan DAK Tahun 2025 tanggal 5 April 2024 sebagai berikut:

- a. Pagu kebutuhan tahun 2025 sebesar Rp80.638.966.701.000,00; kemudian
- b. Pagu indikatif tahun 2025 sebesar 24.765.974.503.000; kemudian
- c. Ada selisih atau *backlog* sebesar Rp55.872.992.198.000,00.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2025 di DPR RI.

3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan program dan kegiatan berskala nasional dalam RAPBN tahun 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang.

Teman-teman Komisi, Pimpinan dan Anggota cukup? Setuju?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Pak Menteri, setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.
Kita semua setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Tepuk tangan buat kita semua.

(TEPUK TANGAN DARI SELURUH PESERTA RAPAT)

Sebelum saya akhiri, Pak Menteri, karena nanti kita jam 3 rapat lagi di sini evaluasi mudik balik lebaran, mungkin kata-kata penutup Pak Menteri mungkin kami perlu disampaikan.

Saya persilakan, Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (IR. BUDI KARYA SUMADI):

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya, dan
Salam kebajikan.*

Pak Ketua,
Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Saya bangga bekerja sama dengan Komisi V, banyak hal-hal yang kita diskusikan, banyak juga hasil diskusi itu memberikan satu hal yang signifikan dan ini tentu tidak terlepas dari kerja sama kita semuanya.

Kami melihat bahwa apa yang Bapak-Ibu sampaikan adalah suatu upaya memberikan masukan secara riil apa yang ada di lapangan dan kami mengeksekusi bila memang ada anggaran atau memang sesuai pasti kami lakukan.

Oleh karenanya, tadi ada saran bahwa aspirasi itu kita prioritaskan dikeluarkan dari AA (*Automatic Adjustment*), kami setuju dan kami akan melakukan upaya-upaya agar apa yang menjadi program kita bersama itu *deliver* dan-dan semuanya bermanfaat untuk masyarakat.

Lalu juga tentu kami belum maksimal, kami mohon maaf apabila ada-ada yang belum maksimal, namun yakini bahwa apa yang sudah kami lakukan adalah upaya-upaya yang optimal kita lakukan, bahkan di sisa 4-5 bulan terakhir ini kami berusaha untuk memberikan suatu yang terbaik dan memberikan kebaikan bagi masyarakat.

Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat dan katakanlah ada yang tidak pas lah dengan para rekan-rekan Komisi V.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih.

Kita kasih *applause* buat Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan.

(TEPUK TANGAN DARI SELURUH PESERTA RAPAT)

Baik.

Pak Menteri, terima kasih, Bapak-Ibu sekalian.

Demikian rapat kita hari ini ya setelah disepakati kesimpulan rapat dan kata-kata penutup dari Pak Menteri, maka rapat saya nyatakan selesai.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat saya nyatakan selesai dan saya tutup.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.*

**(RAPAT SELESAI PUKUL 13.51 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 5 Juni 2024
a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

la